

# Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

AGUSTUS 2025





# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

---

Agustus 2025

# Tim Perumusan KEKDA Provinsi

## Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Agustus 2025

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada stakeholders di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

### Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau  
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam - Indonesia

# Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode Agustus 2025 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, Agustus 2025  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

**Rony Widijarto P.**  
Direktur

# Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	65



## Bab I

### Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

1.1.	PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELOUARAN
1.1.1.	Konsumsi Rumah Tangga
1.1.2.	Konsumsi Pemerintah
1.1.3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB
1.1.4.	Kegiatan Ekspor-Import
1.2.	PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA
1.2.1	Lapangan Usaha Industri Pengolahan
1.2.2	Lapangan Usaha Konstruksi
1.2.3	Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
1.2.4	Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

#### BOKS 1

Laporan *Liaison* Triwulan II 2025  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

## Bab II

### Perkembangan Keuangan Daerah

2.1	REALISASI PENDAPATAN
2.2	REALISASI BELANJA
2.3	ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

#### BOKS 2

Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri

## Bab III

### Perkembangan Inflasi

1	PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	21
3	3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	23
4	3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	24
5	3.2.1. Inflasi Kota Batam	25
5	3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang	25
5	3.2.3. Inflasi Kabupaten Karimun	25
6	3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	26
7	3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	26

## Bab IV

### Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

8	PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	29
9	4.1 Perkembangan Aset Perbankan	31
11	4.1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	31
13	4.1.2 Perkembangan Kredit Perbankan	32
14	4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	32
16	4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	34
19	4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	34
19	4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	34
19	4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	34
19	4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	36

#### BOKS 3

Gebyar Melayu Pesisir 2025 :  
Sinergi Budaya, UMKM, dan Digitalisasi Menuju Ekonomi Mandiri

**Bab V****Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	39
<b>5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)</b>	41
5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	41
5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	42
5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	42
<b>5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)</b>	42
5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	42
5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	43
5.2.4 Perkembangan QRIS	43
5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	44
5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	45
5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai	45
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	46
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB	46
5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR	46
5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	47

**BOKS 4**

Akselerasi Akseptasi Digital Masyarakat Melalui Carnival 2025

**Bab VI****Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan** 51

6.1 KETENAGAKERJAAN	53
6.1.1 Ketenagakerjaan	53
6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	54
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	54
6.2.2 Kemiskinan	55
6.2.3 <i>Gini Ratio</i> (GR)	55
6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56

**Bab VII****Prospek Perekonomian Daerah** 57

7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	59
7.2. PROSPEK INFLASI	60
7.3. REKOMENDASI	60

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
<b>Tabel 1.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
<b>Tabel 1.3</b>	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
<b>Tabel B1.1</b>	Likert Scale Tahun TW I 2023 s.d TW II 2025 di Kepri	9
<b>Tabel 2.1</b>	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2025	14
<b>Tabel 2.2</b>	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2025	15
<b>Tabel 2.3</b>	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	17
<b>Tabel 2.4</b>	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	17
<b>Tabel 3.1</b>	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	23
<b>Tabel 3.2</b>	Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Juni 2025	23
<b>Tabel 3.3</b>	Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Juni 2025	23
<b>Tabel 3.4</b>	Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Juni 2025	23
<b>Tabel 3.5</b>	Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Juni 2025	23
<b>Tabel 3.6</b>	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%, yoy)	24
<b>Tabel 3.7</b>	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	25
<b>Tabel 4.1</b>	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	31
<b>Tabel 4.2</b>	Penyaluran Kredit (Spasial)	33
<b>Tabel 4.3</b>	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	35
<b>Tabel 6.1</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	53
<b>Tabel 6.2</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	53
<b>Tabel 6.3</b>	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	53
<b>Tabel 6.4</b>	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	54
<b>Tabel 6.5</b>	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	54
<b>Tabel 6.6</b>	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	55
<b>Tabel 6.7</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	56
<b>Tabel 6.8</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	56
<b>Tabel 7.1</b>	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025	60
<b>Tabel 7.2</b>	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025	60

# Daftar Gambar

<b>Gambar B2.1</b>	Rangkaian Kegiatan Kick Off SERAMBI 2025 di KPw BI Provinsi Kepulauan Riau	20
<b>Gambar B2.2</b>	Kegiatan layanan penukaran uang bersama perbankan dan Edukasi CBP Rupiah di One Batam Mall 18 sd 19 Maret 2025	20
<b>Gambar B3.1</b>	Pembukaan Gebyar Melayu Pesisir 2025	37
<b>Gambar B3.2</b>	Laporan Pelaksanaan Gebyar Melayu Pesisir oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Rony Widijarto Purubaskoro	38
<b>Gambar B3.3</b>	Sambutan dari Asisten Gubernur Bank Indonesia Bapak Doddy Zulverdi	38
<b>Gambar B3.4</b>	Sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Drs. Adi Prihantara, MM.	38
<b>Gambar B3.5</b>	Seminar UMKM dengan topik "Wastra Reimagined: Menyatukan dalam Fashion Modern"	38
<b>Gambar B3.6</b>	Stand Bazaar Makanan UMKM	38
<b>Gambar B3.7</b>	Produk UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau	38
<b>Gambar B3.8</b>	Fun Run	38
<b>Gambar B4.1</b>	Opening Ceremony CERNIVAL 2025	49
<b>Gambar B4.2</b>	Semarak CERNIVAL 2025	49

# Daftar Grafik

<b>Grafik 1.1</b>	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulan)	3	<b>Grafik 2.4</b>	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan II 2025	15
<b>Grafik 1.2</b>	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3	<b>Grafik 2.5</b>	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan II 2025	16
<b>Grafik 1.3</b>	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4	<b>Grafik 2.6</b>	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	16
<b>Grafik 1.4</b>	Kredit Multiguna	4	<b>Grafik 3.1</b>	Inflasi Triwulan II 2025 Regional Sumatera (% yoy)	24
<b>Grafik 1.5</b>	Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseorangan	4	<b>Grafik 3.2</b>	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan II 2025 (% yoy)	24
<b>Grafik 1.6</b>	Realisasi Belanja APBD	4	<b>Grafik 3.3</b>	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	24
<b>Grafik 1.7</b>	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	5	<b>Grafik 4.1</b>	Perkembangan Aset Perbankan	32
<b>Grafik 1.8</b>	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5	<b>Grafik 4.2</b>	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	32
<b>Grafik 1.9</b>	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5	<b>Grafik 4.3</b>	Perkembangan DPK Perbankan	32
<b>Grafik 1.10</b>	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	5	<b>Grafik 4.4</b>	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	32
<b>Grafik 1.11</b>	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	5	<b>Grafik 4.5</b>	Perkembangan Kredit Perbankan	32
<b>Grafik 1.12</b>	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal	6	<b>Grafik 4.6</b>	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	32
<b>Grafik 1.13</b>	<i>Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, &amp; Optical Products</i>	6	<b>Grafik 4.7</b>	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	33
<b>Grafik 1.14</b>	Perkembangan Impor	6	<b>Grafik 4.8</b>	Perkembangan Suku Bunga Kredit	33
<b>Grafik 1.15</b>	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	6	<b>Grafik 4.9</b>	Kredit Sektor Industri Pengolahan	33
<b>Grafik 1.16</b>	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	6	<b>Grafik 4.10</b>	Kredit Konstruksi	33
<b>Grafik 1.17</b>	Kredit Sektor Industri Pengolahan	7	<b>Grafik 4.11</b>	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	34
<b>Grafik 1.18</b>	Perkembangan Ekspor Non Migas	7	<b>Grafik 4.12</b>	Perkembangan Kredit Korporasi	34
<b>Grafik 1.19</b>	Kredit Sektor Konstruksi	8	<b>Grafik 4.13</b>	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	34
<b>Grafik 1.20</b>	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8	<b>Grafik 4.14</b>	Survei Ekspektasi Konsumen	34
<b>Grafik 1.21</b>	Survei Konsumen	8	<b>Grafik 4.15</b>	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	35
<b>Grafik 1.22</b>	Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	8	<b>Grafik 4.16</b>	Kredit Rumah Tangga	35
<b>Grafik 1.23</b>	Perkembangan Ekspor Migas	8	<b>Grafik 4.17</b>	Kredit Konsumsi	35
<b>Grafik B1.1</b>	Perbandingan Kapasitas Utilisasi dan Penjualan	10	<b>Grafik 4.18</b>	DPK Perseorangan	35
<b>Grafik B1.2</b>	LS Kapasitas Utilisasi dan LS Investasi	10	<b>Grafik 4.19</b>	Pangsa DPK Perseorangan	36
<b>Grafik 2.1</b>	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan II 2025	13	<b>Grafik 4.20</b>	Perkembangan Kredit UMKM	36
<b>Grafik 2.2</b>	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan II 2025	13	<b>Grafik 5.1</b>	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	41
<b>Grafik 2.3</b>	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	14	<b>Grafik 5.2</b>	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	41
			<b>Grafik 5.3</b>	Perkembangan Pemusnahan UTLE	42
			<b>Grafik 5.4</b>	Perkembangan Temuan Uang Palsu	42

# Daftar Grafik

<b>Grafik 5.5</b>	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	42
<b>Grafik 5.6</b>	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	42
<b>Grafik 5.7</b>	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	43
<b>Grafik 5.8</b>	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	43
<b>Grafik 5.9</b>	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	43
<b>Grafik 5.10</b>	Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri	43
<b>Grafik 5.11</b>	Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha	44
<b>Grafik 5.12</b>	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	44
<b>Grafik 5.13</b>	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	44
<b>Grafik 5.14</b>	Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	45
<b>Grafik 5.15</b>	Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	45
<b>Grafik 5.16</b>	Penyaluran Program Sembako Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	45
<b>Grafik 5.17</b>	Perkembangan Transaksi KUPVA	46
<b>Grafik 5.18</b>	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	46
<b>Grafik 5.19</b>	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	46
<b>Grafik 5.20</b>	Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen hingga Triwulan II 2025	47
<b>Grafik 6.1</b>	Perkembangan NTP	55
<b>Grafik 6.2</b>	NTP Berdasarkan Subsektor	55
<b>Grafik 6.3</b>	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri	55
<b>Grafik 6.4</b>	Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera	56
<b>Grafik 6.5</b>	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	56
<b>Grafik 7.1</b>	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	59
<b>Grafik 7.2</b>	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	59
<b>Grafik 7.3</b>	Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik	59
<b>Grafik 7.4</b>	Likert Scale Perkiraan Investasi	59

# Ringkasan Eksekutif

**Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh 7,14% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya yakni 5,16% (yoy).** Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 7,14% (yoy), terakses dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,96% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,12% (yoy).

**Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh Net Ekspor, PMTB, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi LU, pertumbuhan ekonomi didukung oleh LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi.** Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

**Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan II 2025 tercatat melandai dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.** Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan II 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan II 2024, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

**Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 sebesar 1,32%, lebih rendah dibanding triwulan I 2025.** Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada Triwulan II 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Pendidikan; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan II 2025 berada di bawah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).

**Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan II 2025 terjaga dan tumbuh positif dibanding triwulan sebelumnya** Intermediasi perbankan pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit yang melemah disertai dengan risiko kredit mengalami peningkatan.

# Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non tunai mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sejalan dengan tren akselerasi ekonomi yang terus berlanjut. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami penurunan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun pada hampir seluruh sub-sektor. Meskipun demikian, NTP masih terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara umum masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Perekonomian global diprakirakan tetap melambat meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Amerika Serikat diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penetapan tarif resiprokal yang jauh lebih rendah berdampak pada revisi atas dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor pendukung terjadinya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Selain itu, transaksi non tunai tercatat mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Perekonomian global diprakirakan melambat. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi.

Tekanan inflasi pada tahun 2025 tetap terjaga yang didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasokan, dan sinergi TPID dan GNPIP.

## BAB I

# Perkembangan Ekonomi Prov. Kepulauan Riau

### Pertumbuhan Ekonomi



### Konsumsi RT



### Investasi



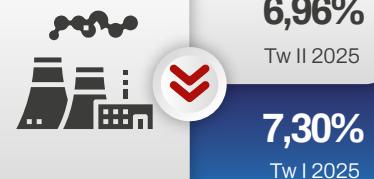
### Net Ekspor



### Konsumsi Pemerintah



### Industri Pengolahan



### Perdagangan



### Pertambangan



### Konstruksi



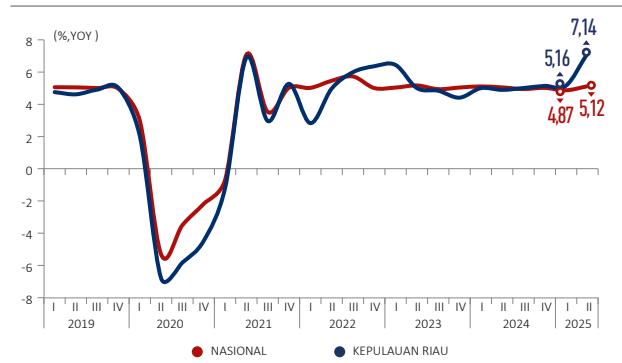
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 tumbuh positif sebesar 7,14% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,16% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,96% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 5,12% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

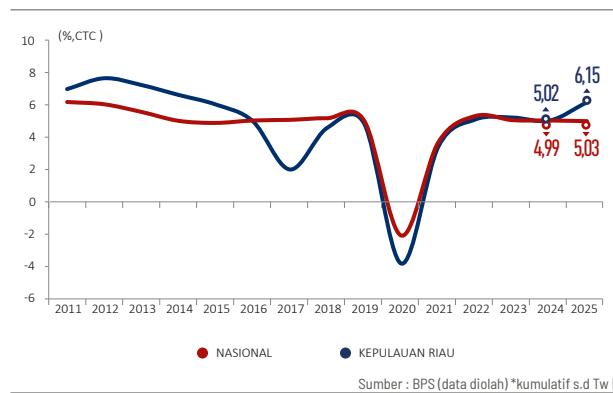


**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp55.205,87 miliar atau tumbuh 7,14% (yoy).** Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,16% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen PMTB, Net Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga.

**Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II 2025 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,96% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 5,12% (yoy).** Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,14% (yoy), 5,42% (yoy), dan 5,09% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan II 2025 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,18% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,50%), Riau (22,45%), Sumatera Selatan (13,82%) dan Lampung (10,30%).



Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulan)



Sumber : BPS (data diolah) \*kumulatif s.d Tw I

Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

## 1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELOUARAN

**Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 44,76%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 42,06% dari total PDRB.**

Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan masih mengalami pertumbuhan yang positif sejalan dengan sejumlah momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), periode libur sekolah, dan cuti bersama di triwulan II.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 7,76%, sejalan dengan nominal ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 3,90%, didukung oleh berlanjutnya pengeluaran belanja pemerintah untuk program-program strategis.

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (% ,yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% ,yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (% ,qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% ,qtq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2025 (% ,ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% ,ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera(%)
1	Aceh	4,59	4,82	-6,05	3,02	4,59	4,70	4,89
2	Sumatera Utara	4,67	4,69	-0,99	2,97	4,67	4,68	23,50
3	Sumatera Barat	4,66	3,94	-0,01	1,52	4,66	4,24	6,76
4	Riau	4,65	4,59	-0,29	1,52	4,65	4,62	22,45
5	Jambi	4,55	4,99	-3,75	5,60	4,55	4,78	6,68
6	Sumatera Selatan	5,22	5,42	0,16	4,65	5,22	5,32	13,82
7	Bengkulu	4,84	4,99	-2,27	6,95	4,84	4,92	2,18
8	Lampung	5,47	5,09	-1,11	9,33	5,47	5,27	10,30
9	Kep. Bangka Belitung	4,60	4,09	-3,87	5,55	4,60	4,34	2,24
10	Kepulauan Riau	5,16	7,14	-2,78	2,51	5,16	6,15	7,18
	SUMATERA	4,85	4,96	-1,34	3,70	4,85	4,90	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya

▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)



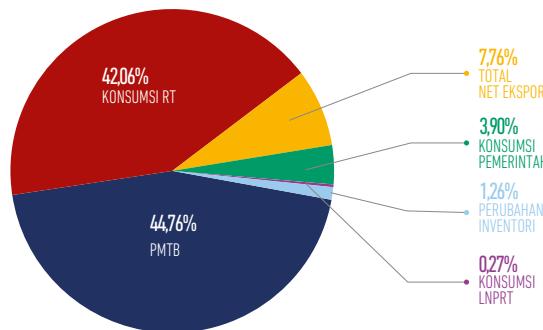
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025			ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	2,97	4,51	3,15	3,90	3,80	▲
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	9,71	10,00	▲
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	4,17	-15,32	15,32	▼
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	8,70	8,70	▲
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	213,45	-198,09	273,92	45,09	35,95	5,87	6,09	6,09	▼
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	2,02	-20,48	17,47	30,17	4,68	14,47	21,36	21,36	▲
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	22,80	27,02	27,02	▲
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	23,83	27,54	27,54	▲
<b>PERTUMBUHAN PDRB</b>	<b>6,44</b>	<b>5,01</b>	<b>4,84</b>	<b>4,41</b>	<b>5,16</b>	<b>5,00</b>	<b>4,90</b>	<b>5,01</b>	<b>5,14</b>	<b>5,02</b>	<b>5,16</b>	<b>7,14</b>	<b>7,14</b>	<b>▲</b>

▲ Menguat

▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber : BPS (data diolah)

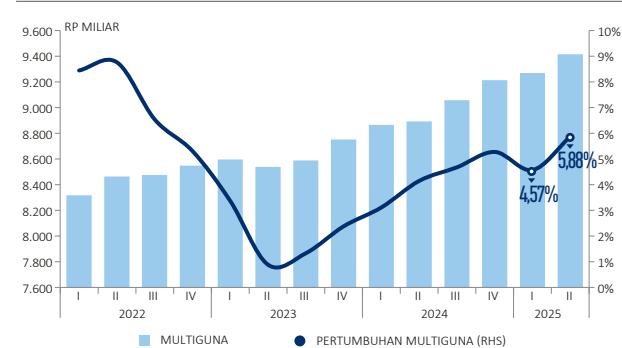
Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

### 1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

**Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 3,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,15% (yoy).** Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya pertumbuhan kredit multiguna, dari 4,57% (yoy) pada triwulan I 2025 menjadi 5,88% (yoy) di triwulan II 2025. Peningkatan konsumsi RT ini juga sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseorangan yang tumbuh melambat sebesar 1,71% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh 4,14% (yoy). Melambatnya pertumbuhan DPK Perseorangan mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, akselerasi konsumsi RT pada triwulan II juga didukung oleh sejumlah momen libur HBKN dan cuti bersama yang mendorong belanja masyarakat.



Grafik 1.5 Dana Pihak Ketiga(DPK) Perseorangan

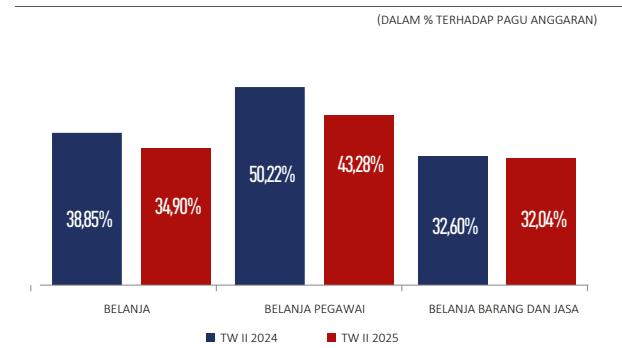


Grafik 1.4 Kredit Multiguna

### 1.1.2. Konsumsi Pemerintah

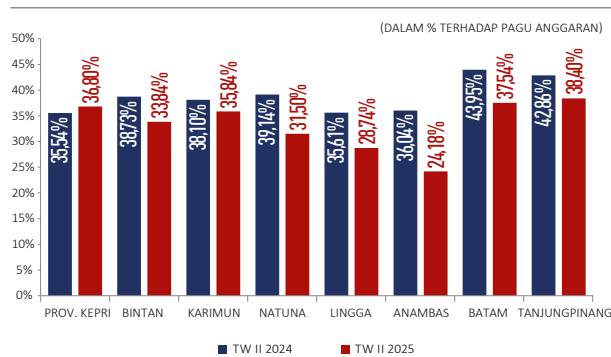
**Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 mengalami kontraksi.** Pada triwulan II 2025, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 15,32% (yoy), berbanding terbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,17% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan penurunan total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan II 2025 mencapai 34,90% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang sebesar 38,85%.

**Secara spasial, hampir seluruh Pemda di wilayah Kepri mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan triwulan II 2024.** Peningkatan realisasi belanja hanya dicatat oleh Provinsi Kepri, yang meningkat dari 35,54% menjadi 36,80%. Adapun realisasi belanja tertinggi di triwulan II 2025 dicatat oleh Kota



Sumber : BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD

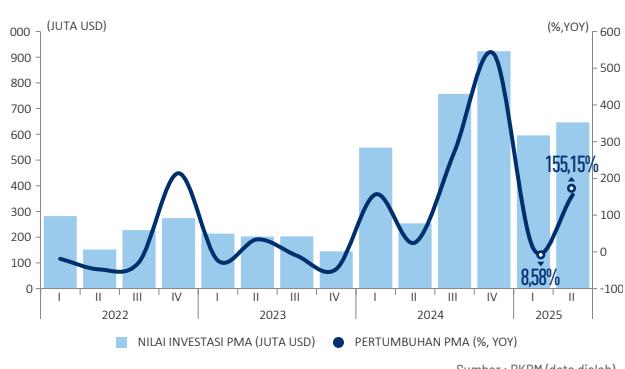


Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri

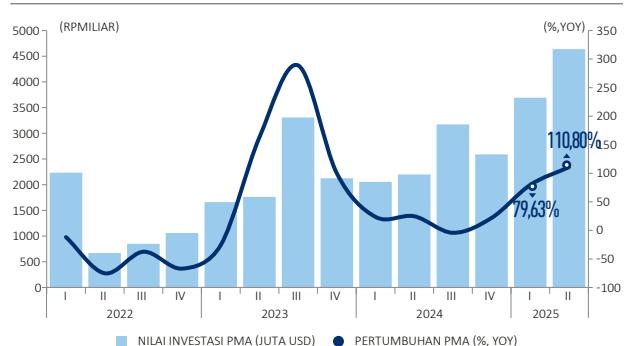
Tanjungpinang yang sebesar 38,40%, menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 42,86%. Selanjutnya, Kota Batam menurun dari 43,95% menjadi 37,54%, Kabupaten Karimun menurun dari 38,10% menjadi 35,84%, Kabupaten Bintan menurun dari 38,73% menjadi 33,84%, Kabupaten Natuna menurun dari 39,14% menjadi 31,50%, Kabupaten Lingga menurun dari 35,61% menjadi 28,74%, serta Kabupaten Kepulauan Anambas menurun dari 36,04% menjadi 24,18%.

### 1.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 8,70% (yo), terakelerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27% (yo). Akselerasi tersebut terkonfirmasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Kepri yang tumbuh sebesar 155,15% (yo), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya



Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



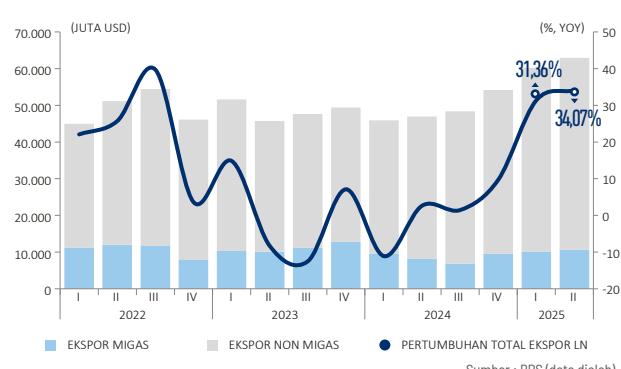
Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

yang tumbuh sebesar 8,58% (yo). Peningkatan juga terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh sebesar 110,80% (yo), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 79,63% (yo). Pertumbuhan yang tinggi pada PMA dan PMDN menunjukkan bahwa Kepri masih menjadi salah satu wilayah tujuan investasi unggulan di Indonesia.

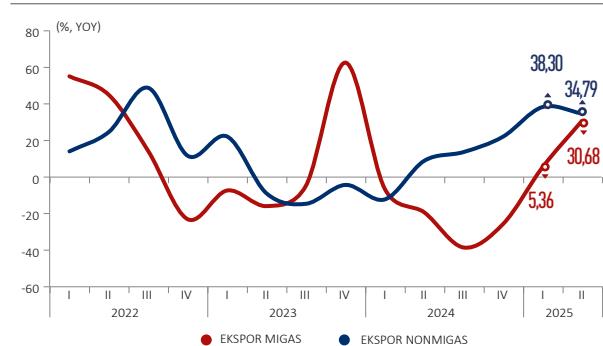
### 1.1.4. Kegiatan Ekspor-Import

**PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 21,36% (yo), terakelerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,47% (yo).** Pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 27,02% (yo), atau terakelerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,80% (yo). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 27,54% (yo), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,83% (yo). Ekspor yang terakelerasi sejalan dengan nilai total ekspor ke luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 34,07% (yo), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 31,36% (yo).

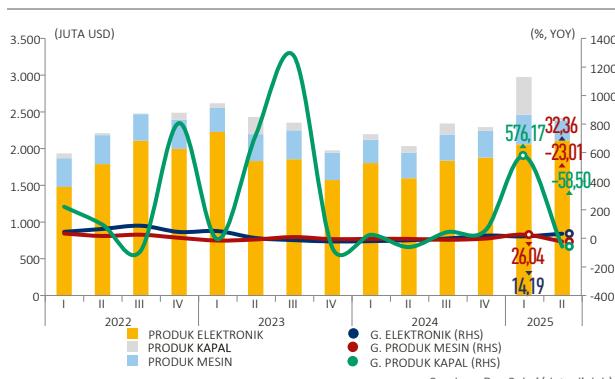
**Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terakelerasi sejalan dengan meningkatnya ekspor migas dan produk elektronik.** Nominal ekspor migas pada triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 30,68% (yo), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,36% (yo). Adapun pertumbuhan nominal ekspor produk elektronik juga mengalami kenaikan, dari 14,19% (yo) menjadi 32,36% (yo). Di



Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



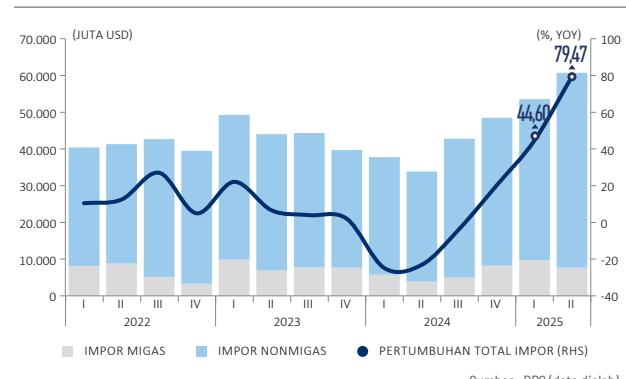
Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas



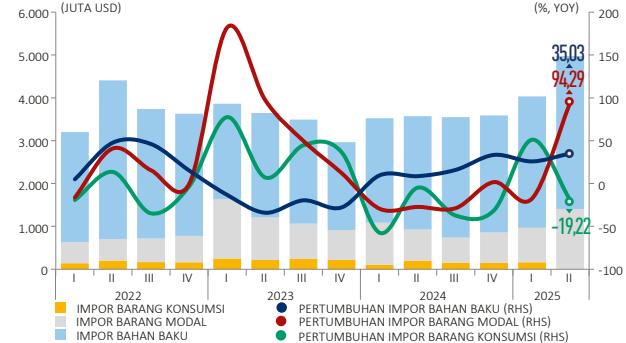
Grafik 1.12 Perkembangan Eksport Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal

sisi lain, kinerja ekspor yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya eksport produk mesin dan produk kapal. Nominal eksport produk mesin pada triwulan II 2025 terkontraksi sebesar 23,01% (yo), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 26,04% (yo). Sementara itu, nominal eksport produk kapal juga terkontraksi sebesar 58,50% (yo), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 576,17% (yo).

**Sejalan dengan arah pertumbuhan eksport secara total yang meningkat, PDRB impor juga tercatat mengalami akseleserasi.** Total impor Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 27,54% (yo), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,83% (yo). Selanjutnya, total nilai impor luar negeri juga tumbuh sebesar 79,47% (yo) pada triwulan II 2025, tercatat lebih tinggi dari sebelumnya yang tumbuh 44,60% (yo). Meningkatnya impor luar negeri terutama disebabkan oleh peningkatan impor barang modal dan bahan baku. Nilai impor barang modal dari luar negeri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 94,29% (yo), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 17,58% (yo). Adapun impor bahan baku tumbuh sebesar 35,03% (yo), juga meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,75% (yo). Di sisi lain, impor barang konsumsi mengalami kontraksi sebesar 19,22% (yo), setelah triwulan sebelumnya tumbuh 51,19% (yo).



Grafik 1.14 Perkembangan Impor

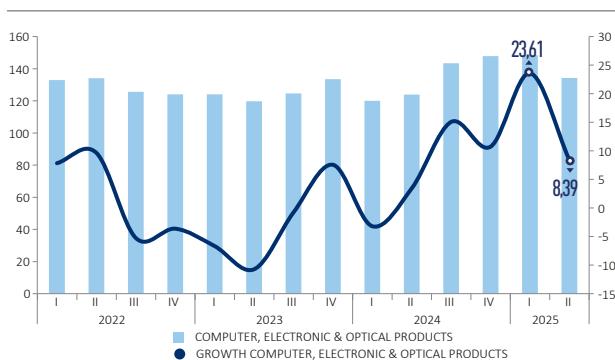


Grafik 1.15 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC

## 1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang tetap baik serta kinerja sektor pertambangan yang meningkat pada triwulan II 2025 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang terutama oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, serta LU Konstruksi.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 41,40%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,58%,



Grafik 1.13 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products



Grafik 1.16 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

**Tabel 1.3** Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

PDRB Sisi Lapangan Usaha	2023					2024					2025			ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	-2,75	13,40	▲	
Pertambangan dan Penggalian	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	0,99	24,21	▲	
Industri Pengolahan	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	7,30	6,96	▼	
Pengadaan Listrik, Gas	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	2,70	9,71	▲	
Pengadaan Air	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	7,33	16,89	▲	
Konstruksi	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	3,84	7,75	▲	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	10,29	6,96	▼	
Transportasi dan Pergudangan	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	3,57	6,27	▲	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	2,47	-0,63	▼	
Informasi dan Komunikasi	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	-5,98	-8,96	▼	
Jasa Keuangan	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	5,05	0,15	▼	
Real Estate	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	-0,13	11,38	▲	
Jasa Perusahaan	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	26,89	25,03	▼	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	8,10	-15,16	▼	
Jasa Pendidikan	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	9,01	6,07	▼	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	9,04	-0,07	▼	
Jasa lainnya	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	16,41	-3,27	▼	
<b>PERTUMBUHAN PDRB</b>	<b>6,44</b>	<b>5,01</b>	<b>4,84</b>	<b>4,41</b>	<b>5,16</b>	<b>5,00</b>	<b>4,90</b>	<b>5,01</b>	<b>5,14</b>	<b>5,02</b>	<b>5,16</b>	<b>7,14</b>	<b>▲</b>	

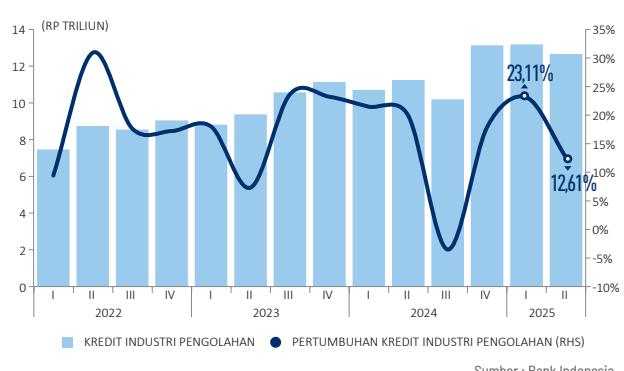
▲ Menguat  
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 9,77% dan 9,64%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik, meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat pada sejumlah momen HBKN dan cuti bersama.

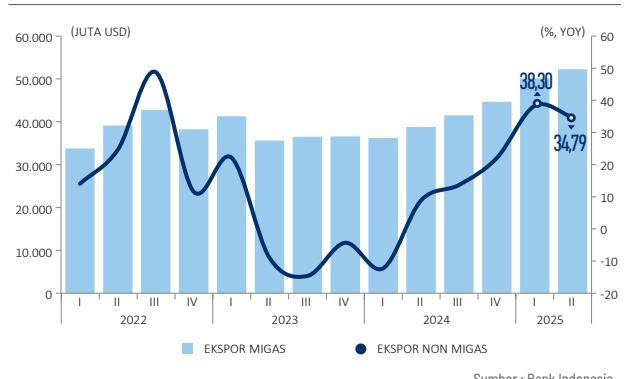
## 1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

**LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 6,96% (yoY), terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,30% (yoY) dan memberikan andil 2,91% terhadap pertumbuhan**



Grafik 1.17 Kredit Sektor Industri Pengolahan

**Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya.** Kinerja LU Industri Pengolahan yang melandai tercermin dari melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut, dari 23,11% (yoY) pada triwulan I 2025 menjadi tumbuh 12,61% (yoY) di triwulan II 2025. Selain itu, perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan juga terlihat dari ekspor non migas tumbuh sebesar 34,79% (yoY), melandai dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 38,30% (yoY), namun masih terjaga di level yang tinggi.



Grafik 1.18 Perkembangan Eksport Non Migas

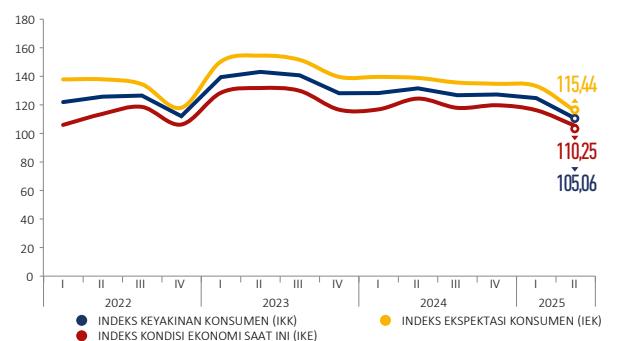
## 1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

**LU Konstruksi pada triwulan II 2025 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** LU Konstruksi pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 7,75% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,84% (yoY). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi



Grafik 1.19 Kredit Sektor Konstruksi

Sumber : Bank Indonesia (diolah)



Grafik 1.21 Survei Konsumen

Sumber : Bank Indonesia

terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit pada sektor tersebut di Provinsi Kepri yang tumbuh sebesar 19,95% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Kinerja LU Konstruksi juga didukung oleh pembangunan sejumlah ruas jalan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih terus berlanjut. Akselerasi LU Konstruksi juga tercermin dari penjualan semen yang tumbuh 45,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,95% (yoy).

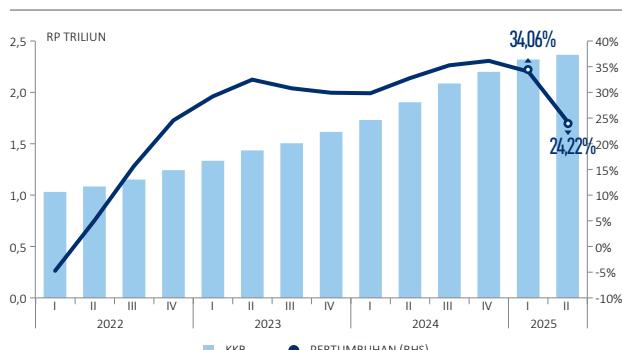
### 1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

**Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 6,96% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,29% (yoy).** Hal tersebut sejalan dengan Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 124,67 pada triwulan sebelumnya menjadi 110,25 di triwulan II 2025. Meskipun demikian, kinerja LU Perdagangan yang masih tumbuh tercermin dari IKK yang masih berada dalam level optimis (> 100), menunjukkan masih tingginya optimisme masyarakat terhadap perekonomian, serta didukung oleh sejumlah momen HBKN serta kunjungan wisatawan ke Kepri yang masih terjaga sebagai salah satu destinasi unggulan. Selanjutnya, deselerasi LU Perdagangan juga terlihat dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang tumbuh melambat, dari 34,06% (yoy) menjadi 24,22% (yoy).



Grafik 1.20 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)

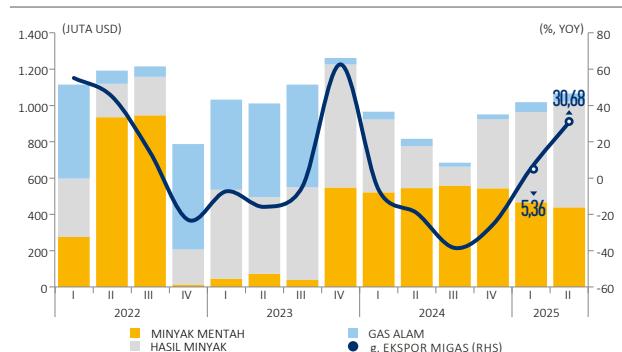


Grafik 1.22 Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

### 1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

**Pada triwulan II 2025 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 24,21% (yoy), atau mengalami akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 0,99% (yoy).** LU Pertambangan yang tumbuh meningkat ditunjukkan oleh eksport migas yang juga tumbuh sebesar 30,68% (yoy), terutama didukung oleh pertumbuhan ekspor hasil minyak dan gas alam yang masing-masing tumbuh sebesar 150,69% (yoy) dan 15,81% (yoy). Meningkatnya eksport migas tersebut juga didukung oleh sejumlah proyek migas yang baru *onstream* di wilayah Natuna, antara lain lapangan migas Forel dan Terubuk.



Grafik 1.23 Perkembangan Eksport Migas

Sumber : BPS (data diolah)

**BOKS 1**

# Laporan *Liaison* Triwulan II 2025

## Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

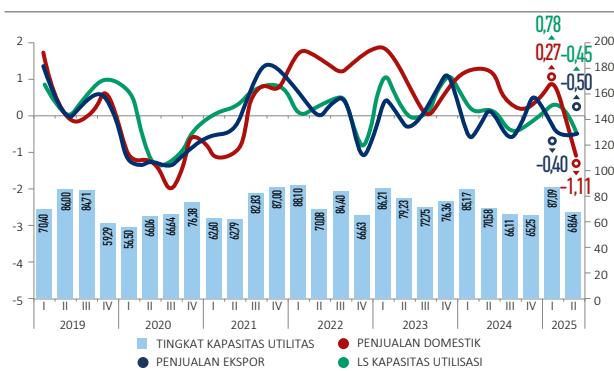
Untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan wawancara kegiatan dunia usaha atau *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus *liaison* pada triwulan I tahun 2025 terdiri dari 11 kontak perusahaan dengan sebaran Industri Pengolahan (63,6%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (27,3%), dan Pengadaan Listrik dan Gas (9,1%). Ruang lingkup analisa laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis di masa yang akan datang dengan ringkasan nilai *likert* sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

**Tabel B1.1** Likert Scale Tahun TW I 2023 s.d TW II 2025 di Kepri

INDIKATOR	2023				2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>KONDISI SAATINI</b>												
Produksi dan Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20	0,29	0,78	-1,11		
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60	0,45	-0,40	-0,50		
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45	-0,17	0,27	-0,45		
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33	-0,40	0,18	0,00		
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58	0,67	0,82	0,73		
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46	0,38	0,36	0,18		
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15	0,09	0,27	0,45		
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00		
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31	0,50	1,00	0,27		
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58	-0,08	0,27	-0,18		
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23	0,33	-0,09	-0,18		
<b>PERKIRAAN KE DEPAN</b>												
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08	0,92	0,36	0,55		
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50	0,18	0,45	0,00		
Perkiraan jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46	0,33	0,36	0,27		
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82	0,83	0,82	0,64		
Tingkat Kapasitas Utilisasi	86,21	79,23	72,75	76,36	85,17	70,58	66,11	65,25	87,09	68,64		

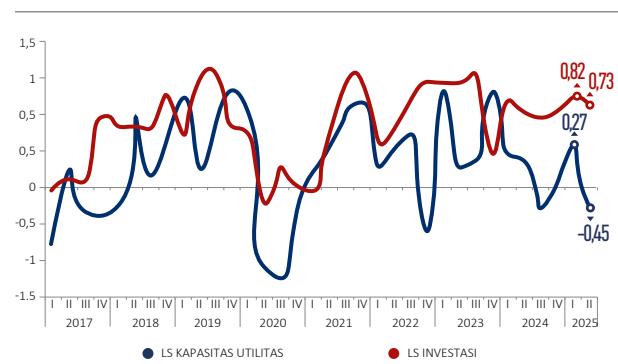
Berdasarkan hasil *liaison* triwulan II 2025, produksi dan penjualan domestik **mengalami penurunan** tercermin dari *likert scale* yang terkontraksi sebesar -1,11, **lebih rendah** dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,78. Secara umum, kinerja penjualan/produksi domestik di wilayah Kepri **melemah pada sektor Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**. Penjualan/produksi pada sektor Industri Pengolahan menurun didorong oleh pelemahan *demand* ditambah dengan ketidakpastian kondisi ekonomi. Penurunan yang terjadi khususnya pada industri galangan kapal disebabkan oleh berkurangnya proyek *mining* dan kebijakan efisiensi belanja pemerintah sehingga perusahaan hanya mengerjakan proyek *carry forward* dari tahun lalu. Pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, penurunan terjadi cukup drastis disebabkan menurunnya *occupancy* dan hunian kamar serta berkurangnya event dari *government, corporate, wedding* serta *travel agent* sebagai dampak dari kebijakan efisiensi. Sebagian besar perusahaan saat ini hanya mengandalkan penjualan dari sisi *free independent traveller (FIT)* serta dari *food and beverages (FnB)*.

Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor turut mengalami penurunan tercermin dari nilai *likert scale* sebesar -0,50, **lebih rendah** dibanding triwulan sebelumnya sebesar -0,40. Kinerja ekspor yang terkontraksi ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor Industri Pengolahan serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penurunan penjualan ekspor sektor Industri Pengolahan didorong oleh penurunan permintaan global yang dipicu oleh beberapa faktor seperti tensi geopolitik serta dampak kebijakan Trump yang mengakibatkan berkurangnya orderan dari AS sebagai pangsa pasar terbesar. Kebijakan Trump salah satunya mendorong pembangunan pabrik di AS serta menerapkan *import tax* bagi para impotir. Pada industri galangan kapal, penurunan *project* disebabkan oleh kebijakan di beberapa negara tujuan khususnya Tiongkok dan India yang saat ini mengurangi impor kapal dan beralih ke penggunaan produk kapal dalam negeri masing-masing. Di sisi lain, kinerja ekspor pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tertahan akibat tingginya harga tiket ferry ke Batam sehingga wisatawan lebih memilih alternatif tujuan wisata yang lebih terjangkau yaitu Malaysia. Berkurangnya proyek yang dikerjakan oleh industri di Batam juga mempengaruhi penurunan jumlah hunian *long-stay* dari tamu mancanegara.



Grafik B1.1 Perbandingan Kapasitas Utilisasi dan Penjualan

Tingkat kapasitas utilisasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efisiensi operasi. Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 68,64%, **menurun** dari periode sebelumnya sebesar 87,09% tercermin dari *likert scale* kapasitas utilisasi yang terkontraksi sebesar -0,45, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,27 (Grafik 1). Hal ini juga sejalan dengan pelemahan kinerja penjualan domestik dan ekspor pada triwulan II 2025. Penurunan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dipengaruhi oleh jumlah produksi dan tingkat hunian yang menurun. Tingkat kapasitas utilisasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas operasi. Terlihat pada Grafik B1.2, penurunan kapasitas utilisasi pada triwulan II 2025 juga berpengaruh kepada penurunan pengadaan investasi. Perusahaan-perusahaan tidak melakukan investasi dan hanya melakukan *maintenance* rutin.



Grafik B1.2 LS Kapasitas Utilisasi dan LS Investasi

## BAB II

# Perkembangan Keuangan Pemerintah

### Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw II  
2025

**41,32%**  
Rp5,73 T



Tw II  
2024

**44,10%**  
Rp6,43 T

### Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw II  
2025

**36,17%**  
Rp5,25T



Tw II  
2024

**38,15%**  
Rp5,84T

### Realisasi Belanja APBN



Tw II  
2025

**37,37%**  
Rp6,20 T



Tw II  
2024

**38,89%**  
Rp7,25 T

### Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw II  
2025

**12,73%**  
Rp147,41 M



Tw II  
2024

**26,77%**  
Rp517,51 M

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan II 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan II 2024, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

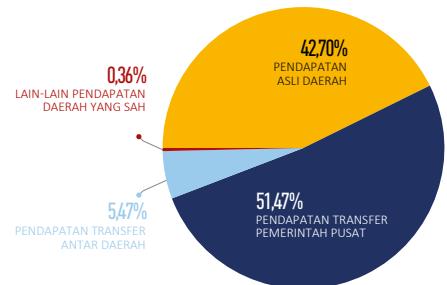


Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan II 2025 tercatat sebesar 41,32%, sementara realisasi belanja mencapai 36,17% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 44,10%, sedangkan realisasi belanja lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 38,15%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara, pos Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja disebabkan oleh kenaikan pada pos Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

## 2.1 REALISASI PENDAPATAN

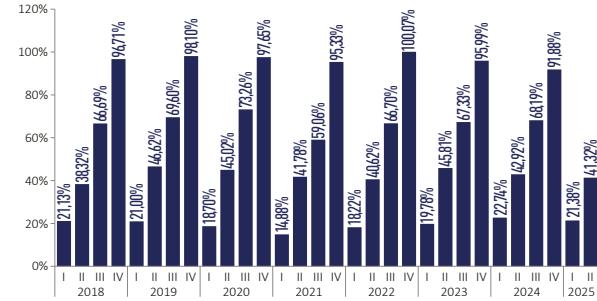
**Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan II 2025 mencapai 41,32% dari total anggaran atau sebesar Rp5,73 triliun.** Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 44,10% dari total anggaran. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Meskipun demikian, penurunan realisasi anggaran yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan persentase pada pos Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan II 2025 mencapai Rp2,95 triliun atau sebesar 38,21% dari pagu anggaran dan memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 51,47% dari pagu anggaran.** Capaian tersebut secara persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 44,93% dari pagu. Penurunan tersebut terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan dan Dana Desa. Realisasi Dana Perimbangan sampai triwulan II 2025 mencapai 41,45% dari pagu anggaran, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 44,46%, didorong oleh realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik, dan Dana Alokasi Non Fisik yang realisasinya lebih



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan II 2025



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan II 2025

rendah dibandingkan periode sebelumnya. Dana Desa tercatat realisasi sebesar 53,47% pada triwulan II 2025, lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya yang dapat mencapai 67,24%. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat insentif atas kinerja 2024 sehingga pos anggaran Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2025 tidak ada. Dengan demikian, dari sisi nominal realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp4,01 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp2,95 triliun pada triwulan II 2025.

Di sisi lain, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan II 2025 tumbuh lebih tinggi dan tercatat sebesar 44,18% dari pagu anggaran dibandingkan dengan triwulan II 2024 yang tercatat terealisasi 42,92% dari pagu anggaran. Secara nominal realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,44 triliun, meningkat dari Rp2,07 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan persentase realisasi terutama disebabkan oleh peningkatan persentase realisasi dari pos anggaran Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Retribusi Daerah meningkat mencapai 43,96% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,24%. Selain itu, realisasi pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan naik dari 37,13% pada triwulan II 2024 menjadi 92,13% pada triwulan II 2025. Lebih lanjut, realisasi pada pos lain-lain PAD yang Sah meningkat menjadi 86,45% dari pagu anggaran sebesar Rp263,81 miliar pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang terealisasi 19,70% dari pagu anggaran sebesar Rp680,82 miliar.

Peningkatan capaian PAD tertahan akibat penurunan realisasi pos Pajak Daerah yang tercatat 41,29%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 47,36%. Sementara itu, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan II 2025 meningkat menjadi sebesar Rp1,90 triliun dari pagu anggaran Rp4,59 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp1,75 triliun dari pagu anggaran Rp3,70 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak daerah secara nominal mengalami peningkatan, meskipun secara presentase mengalami penurunan.



**Tabel 2.1** Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur(%)	Rp	Realisasi(%)	Porsi(%)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.534,05</b>	<b>39,94%</b>	<b>2.444,74</b>	<b>44,18%</b>	<b>42,70%</b>
Pajak Daerah	4.592,82	33,15%	1.901,06	41,39%	
Retribusi Daerah	640,33	4,62%	281,46	43,96%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	37,08	0,27%	34,16	92,13%	
Lain-lain PAD yang Sah	263,81	1,90%	228,06	86,45%	
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>7.710,93</b>	<b>55,65%</b>	<b>2.946,58</b>	<b>38,21%</b>	<b>51,47%</b>
Dana Perimbangan	7.404,35	53,44%	3.068,74	41,45%	
Dana Insentif Fiskal	88,58	0,64%	29,99	0,00%	
Dana Desa	218,00	1,57%	116,55	53,47%	
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>568,56</b>	<b>4,10%</b>	<b>313,25</b>	<b>55,10%</b>	<b>5,47%</b>
Pendapatan Bagi Hasil	548,60	3,96%	308,89	56,31%	
Bantuan Keuangan	19,96	0,14%	4,36	0,00%	
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>42,43</b>	<b>0,31%</b>	<b>20,44</b>	<b>48,17%</b>	<b>0,36%</b>
Hibah	1,32	0,01%	0,00	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	41,11	0,30%	20,44	49,72%	
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>13.855,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.725,02</b>	<b>41,32%</b>	

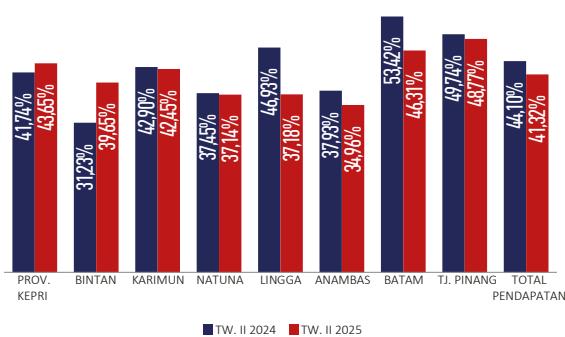
Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

\* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal

\*\* Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan

### Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan II 2025 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1,95 triliun atau 46,31% dari total anggaran.

Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 33,98% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sehingga persentase realisasi Kota Batam mempengaruhi persentase realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat mencapai sebesar Rp1,71 triliun atau 43,65% dari pagu anggaran. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kota Tanjungpinang yang tercatat sebesar Rp533 miliar atau 20,44% dari pagu anggaran tahun ini. Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 41,32% dari pagu anggaran.



**Grafik 2.3** Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

## 2.2 REALISASI BELANJA

**Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan II 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.** Realisasi belanja Pemda hingga triwulan II 2025 mencapai 36,17% dari pagu anggaran atau sebesar Rp5,25 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara presentase terutama terjadi pada pos Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sementara itu, realisasi pada pos Belanja Tidak Terduga dan pos Belanja Transfer tercatat mengalami peningkatan masing-masing dari 5,22% dan 41,25% pada triwulan II 2024 menjadi 23,03% dan 43,25% triwulan II 2025. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 84,26%, diikuti Belanja Transfer sebesar 10,12%, Belanja Modal sebesar 4,68%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,94%. Secara nominal total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14,51 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp15,30 triliun. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana arahan Presiden RI.

**Realisasi Belanja Operasi tercapai sebesar 39,37% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp4,42 triliun.** Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun presentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 42,07% atau Rp4,93 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar dengan porsi 52,31% dari pagu anggaran pos Belanja Operasi, terealisasi mencapai 44,22% atau sebesar Rp2,74 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai secara

**Tabel 2.2** Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan II 2025

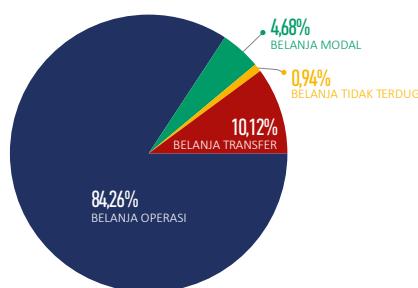
Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
<b>Belanja Operasi</b>	<b>11.231,72</b>	<b>77,41%</b>	<b>4.421,67</b>	<b>39,37%</b>	<b>84,26%</b>
Belanja Pegawai	6.208,26	42,79%	2.744,98	44,22%	52,31%
Belanja Barang dan Jasa	4.466,20	30,78%	1.511,66	33,85%	
Belanja Bunga	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Belanja Subsidi	13,16	0,09%	0,23	1,75%	
Belanja Hibah	521,66	3,60%	160,79	30,82%	
Belanja Bantuan Sosial	22,45	0,15%	4,01	17,84%	
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.836,68</b>	<b>12,66%</b>	<b>245,70</b>	<b>13,38%</b>	<b>4,68%</b>
Belanja Modal Tanah	5,80	0,04%	1,05	18,12%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426,01	2,94%	103,73	24,35%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	545,59	3,76%	30,04	5,51%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	802,87	5,53%	93,23	11,61%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52,79	0,36%	16,84	31,90%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3,62	0,02%	0,80	21,97%	
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>213,05</b>	<b>1,47%</b>	<b>49,07</b>	<b>23,03%</b>	<b>0,94%</b>
<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.228,11</b>	<b>8,46%</b>	<b>531,21</b>	<b>43,25%</b>	<b>10,12%</b>
Belanja Bagi Hasil	675,24	4,65%	317,05	46,95%	
Belanja Bantuan Keuangan	552,87	3,81%	214,16	38,74%	
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>14.509,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.247,65</b>	<b>36,17%</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-608,06</b>		<b>983,00</b>		
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>379,42</b>		<b>145,68</b>	<b>35,59%</b>	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	385,92		145,68	34,22%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,50		0,00	24,06%	
<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-228,63</b>		<b>1.128,68</b>		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

nominal menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp2,83 triliun. Penurunan realisasi pos Belanja Operasi tertahan oleh peningkatan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar 33,85% dari pagu anggaran lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 31,96%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa di triwulan II 2025 mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya pagu pada pos Belanja Barang dan Jasa yakni tercatat sebesar Rp1,51 triliun lebih rendah dari triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp1,63 triliun

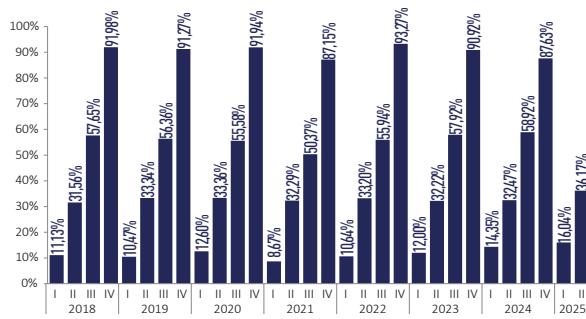
**Percentase realisasi Belanja Modal pada triwulan II 2025 tercatat 13,38% dari pagu anggaran.** Pagu pada pos Belanja Modal mengalami penurunan menjadi Rp1,84 triliun pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp2,20 triliun. Pangsa Pos Belanja Modal sebesar 4,68% terhadap seluruh pos anggaran belanja, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 2,54%. Secara umum, realisasi pos Belanja Modal berdasarkan nominal mengalami penurunan. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan II 2025 tercatat Rp245,70 miliar lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp354,01 miliar. Hal ini sejalan dengan semangat efisien belanja oleh pemerintah.

**Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan II 2025 tercatat Rp1,23 triliun lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan II 2024 yang tercatat Rp1,34 triliun.** Realisasi Belanja Transfer pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp531,21 miliar, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp551,47 miliar. Meskipun demikian, karena pagu anggaran pada triwulan II 2025 lebih rendah dari triwulan II 2024, secara persentase realisasi pada pos Belanja Transfer tercatat 43,25% dari pagu anggaran meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan II 2024 yang tercatat 41,25%.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan II 2025

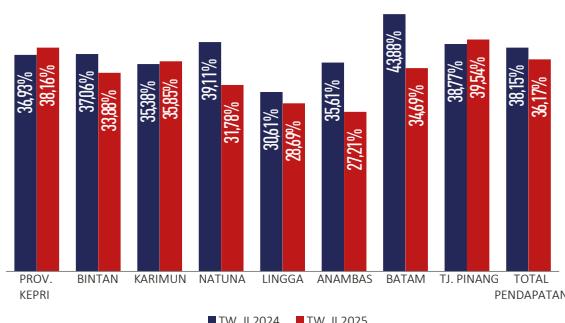


Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan II 2025

Hal ini didorong dengan realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil dan pos Belanja Bantuan Keuangan yang meningkat, tercatat masing-masing secara berturut sebesar 46,95% dari pagu anggaran dan 38,74% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 44,63% dan 36,56%.

**Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi total realisasi belanja pada triwulan II 2025 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 36,17% dari pagu anggaran.** Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kota Tanjungpinang, diikuti persentase realisasi belanja Provinsi Kepri dan persentase realisasi belanja Kabupaten Karimun. Capaian realisasi Kota Tanjungpinang yang tercatat 39,54% dari total anggaran atau sebesar Rp396,74 miliar. Capaian realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kepri dengan jumlah belanja sebesar Rp1,44 triliun atau 38,16% dari total anggaran. Capaian realisasi belanja Kabupaten Karimun tercatat 35,85% dari total anggaran atau sebesar Rp496,33 miliar.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

## 2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

**Secara keseluruhan pada 2025, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat.** Pada tahun 2025, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp18,05 triliun dari

Rp14,92 triliun pada tahun 2024. Sementara target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,50 triliun dari Rp18,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpjakan dengan target menjadi Rp15,38 triliun. Sementara, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp8,05 triliun pada triwulan II 2025 dari Rp10,45 triliun pada triwulan II 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan II 2025 mencapai 36,88% dari pagu atau sebesar Rp6,66 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang mencapai 46,58% dari pagu atau sebesar Rp6,95 triliun. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan pada pos Penerimaan Perpjakan yang hingga triwulan II 2025 tercatat 35,14% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 43,95% dari pagu anggaran. Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2025, secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 0,68% (yoY). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan pajak lainnya yang tercatat Rp753,12 miliar dan pajak perdagangan internasional yang tercatat Rp447,59 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Selain itu, pendapatan APBN turut didukung oleh pertumbuhan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasinya pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 46,88% dari target atau sebesar Rp1,25 triliun. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2024 yang tercatat 58,48% dari target atau sebesar Rp1,58 miliar. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan BLU dan PNBP Lainnya yang lebih rendah dari penerimaan pada triwulan II 2024, sejalan dengan penurunan target dari pos Pendapatan BLU.

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan II 2025 mencapai 37,37% dari pagu atau sebesar Rp6,21 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang mencapai 38,89% dari pagu atau sebesar Rp7,25 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan II 2025 terkontraksi 14,36% (yoY) yang disebabkan oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 31,08% dari target dan 43,44% dari target, lebih rendah dari triwulan II 2024 yang tercapai 33,19% dari target dan 46,19% dari target. Untuk komponen Belanja Pemerintah Pusat penurunan terutama terjadi pada Belanja Modal yang terkontraksi 74,43% (yoY), disusul Belanja Barang yang terkontraksi 27,76% (yoY). Di samping itu, pada komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan II 2025, terkontraksi sebesar 43,44% (yoY). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada DAK Fisik yang terkontraksi 91,00% (yoY), Dana Desa yang terkontraksi 20,48% (yoY), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi sebesar 13,35% (yoY). Sampai dengan triwulan II 2025, Belanja TKD turut mengalami kontraksi sebesar 2,83% (yoY) dipengaruhi oleh belum optimalnya penerimaan daerah termasuk kebijakan efisiensi TKD sehingga OPD wait and see terhadap perubahan anggaran. Pada triwulan II 2025, Neraca APBN menunjukkan surplus sebesar Rp451,10 miliar.

**Tabel 2.3** Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

		2024 (Miliar Rp)			2025 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
Uraian		Pagu	Realisasi Triwulan II 2024	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan II 2025	% Realisasi	
<b>A. Pendapatan Negara</b>		<b>14.923,24</b>	<b>6.951,82</b>	<b>46,58%</b>	<b>18.054,56</b>	<b>6.658,31</b>	<b>36,88%</b>	<b>-4,22%</b>
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>		<b>12.216,15</b>	<b>5.368,80</b>	<b>43,95%</b>	<b>15.381,79</b>	<b>5.405,32</b>	<b>35,14%</b>	<b>0,68%</b>
1. Pajak Dalam Negeri		11.656,95	5.152,28	44,20%	14.945,52	4.957,74	33,17%	-3,78%
a. Pajak Penghasilan		10.301,22	4.660,93	45,25%	10.927,67	3.920,83	35,88%	-15,88%
b. Pajak Pertambahan Nilai		1.205,55	423,14	35,10%	3.960,47	254,04	6,41%	-39,96%
c. Pajak Bumi dan Bangunan		29,39	2,49	8,47%	13,41	2,49	18,55%	-0,02%
d. Cukai		37,40	19,58	52,38%	33,30	27,26	81,86%	39,24%
e. Pajak Lainnya		83,39	46,15	55,34%	10,66	753,12	7063,54%	1532,02%
2. Pajak Perdagangan Internasional		559,20	216,32	38,68%	436,28	447,59	102,59%	106,91%
<b>II. PNBP</b>		<b>2.707,09</b>	<b>1.583,22</b>	<b>58,48%</b>	<b>2.672,77</b>	<b>1.252,98</b>	<b>46,88%</b>	<b>-20,86%</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Pendapatan BLU		2.311,07	1.200,92	51,96%	2.153,28	851,17	39,53%	-29,12%
4. PNBP Lainnya		396,02	382,30	96,54%	519,48	401,81	77,35%	5,10%
<b>III. Hibah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>B. Belanja Negara</b>		<b>18.635,93</b>	<b>7.248,33</b>	<b>38,89%</b>	<b>16.610,16</b>	<b>6.207,20</b>	<b>37,37%</b>	<b>-14,36%</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>		<b>10.454,64</b>	<b>3.469,66</b>	<b>33,19%</b>	<b>8.156,96</b>	<b>2.535,44</b>	<b>31,08%</b>	<b>-26,83%</b>
1. Belanja Pegawai		2.263,90	1.192,89	52,69%	2.250,03	1.220,81	54,26%	2,34%
2. Belanja Barang		4.780,26	1.561,28	32,66%	4.121,34	1.127,79	27,36%	-27,76%
3. Belanja Modal		3.147,76	712,46	22,63%	1.527,59	182,15	11,92%	-74,43%
4. Belanja Bansos		7,82	3,02	38,69%	11,14	4,68	42,06%	54,89%
5. Belanja Lainnya		254,91	0,00	0,00%	246,86	0,00	0,00%	0,00%
<b>II. Transfer ke Daerah (TKD)</b>		<b>8.181,29</b>	<b>3.778,67</b>	<b>46,19%</b>	<b>8.453,20</b>	<b>3.671,76</b>	<b>43,44%</b>	<b>-2,83%</b>
1. DAU		1.149,18	378,61	32,95%	1.056,34	328,07	31,06%	-13,35%
2. Dana Bagi Hasil		4.817,40	2.541,63	52,76%	5.019,47	2.477,17	49,35%	-2,54%
3. DAK Fisik		648,36	51,13	7,89%	619,87	4,60	0,74%	-91,00%
4. DAK Non Fisik		1.245,31	624,38	50,14%	1.427,90	681,73	47,74%	9,19%
5. Dana Insentif Fiskal		227,05	156,33	68,85%	218,00	124,32	57,03%	-20,48%
6. Dana Desa		93,99	26,59	28,29%	111,62	55,88	50,06%	110,15%
7. Transfer Hibah		-3.712,69	-296,51	7,99%	1.444,40	451,10	31,23%	-252,14%
<b>C. SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-3.712,69</b>	<b>-608,93</b>	<b>16,40%</b>	<b>1.554,89</b>	<b>-332,62</b>	<b>-21,39%</b>	<b>-45,38%</b>

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 12,73% atau Rp147,41 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 26,57% atau sebesar Rp571,51 miliar. Belanja untuk proyek infrastruktur terutama untuk proyek program konektivitas laut mencapai 26,57% dari pagu anggaran atau sebesar Rp55,16 miliar. Pengembangan konektivitas laut tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan pelabuhan, pengembangan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, dan peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pengembangan konektivitas udara terealisasi 9,06% dari total anggaran atau sebesar Rp60,59 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal

ini sejalan dengan proyek pengembangan pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo armada udara di Kota Batam yang sedang berlangsung.

**Tabel 2.4** Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	64,06	33,01	51,53%	60,56	5,49	9,06%
2	Konektivitas Laut	412,68	71,62	17,36%	207,59	55,16	26,57%
3	Konektivitas Darat	1.213,94	367,42	30,27%	663,17	48,32	7,29%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	242,30	45,46	18,76%	226,97	38,45	16,94%
<b>Total</b>		<b>1.932,99</b>	<b>517,51</b>	<b>26,77%</b>	<b>1.158,29</b>	<b>147,41</b>	<b>12,73%</b>

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri



Halaman ini sengaja dikosongkan

## BOKS 2

# Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri

Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BI Kepri) bersama perbankan menggelar program **SERAMBI 2025 (Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri)**. Kick Off kegiatan berlangsung pada Selasa, 4 Maret 2025 di Gedung BI Kepri, dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Kepri, Kepala OJK Kepri, pimpinan perbankan, asosiasi perbankan, hingga media lokal dan nasional. Program ini hadir sebagai upaya BI untuk memastikan ketersediaan uang layak edar bagi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri, sekaligus mengedukasi pentingnya **Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah**.

Dalam sambutannya, Kepala BI Kepri menyampaikan bahwa kebutuhan uang kartal masyarakat Kepri diperkirakan mencapai **Rp2,3 triliun** sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Angka ini naik **9,5% (yoy)** dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,1 triliun. Kenaikan kebutuhan uang ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin membaik, meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik, hingga pola belanja yang lebih tinggi menjelang hari raya.

### Semarak Kampanye CBP Rupiah

Untuk melayani kebutuhan tersebut, BI Kepri menyiapkan **Layanan Penukaran Uang di 147 Titik**. Untuk mengoptimalkan layanan tersebut, BI Kepri menggunakan berbagai kanal, mulai dari **kas keliling** di rumah ibadah, pasar, bandara, hingga pelabuhan, serta **penukaran bersama BI dan perbankan** pada 18-19 Maret 2025 di One Batam Mall dengan kuota 1.000 orang. Selain itu, penukaran uang juga bisa dilakukan di **147 titik loket perbankan** di seluruh wilayah Kepri. BI turut menghadirkan layanan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) melalui kas titipan di Karimun, Tanjungpinang, dan Natuna. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan penukaran uang melalui aplikasi **PINTAR** Bank Indonesia.

Kegiatan SERAMBI 2025 juga diwarnai dengan kampanye **"Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah"**. Pesan ini mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan, serta mendukung produk UMKM lokal. Edukasi CBP Rupiah dilakukan bersamaan dengan layanan kas keliling dan penukaran uang, menyasar ribuan masyarakat di berbagai titik, mulai dari masjid, pasar, instansi pemerintahan, hingga bazar Ramadhan seperti **Kepri**

**Ramadhan Fair (Kurma)** di Tanjungpinang dan bazar di Lantamal IV Batam. Pelaksanaan Edukasi CBP Rupiah secara rinci dilaksanakan di berbagai tempat umum yaitu:

- a. Rumah Ibadah (4 masjid) dengan peserta 1.200 orang
- b. Pasar Cipta Puri Tiban peserta 500 orang
- c. Pasar Golden City Batu Ampar dengan peserta 300 orang
- d. Pemprov Kepri dan Pasar Murah dengan peserta 300 orang
- e. Pasar murah pemko Batam dengan peserta 300 orang
- f. Kejaksaan Tinggi Kepri dan sekitarnya dengan peserta 300 orang
- g. Kegiatan Kurma Tanjungpinang dengan peserta 500 orang
- h. Bazar dan Baksos Lantamal IV Batam 500 orang

Kick Off SERAMBI 2025 yang disertai dengan pelaksanaan Edukasi CBP Rupiah ini berlangsung meriah dan dibuka dengan penabuhan gendang dan kompong, pelepasan mobil kas keliling BI dan perbankan, serta ditutup dengan acara buka puasa bersama. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap semangat cinta, bangga, dan paham Rupiah semakin meningkat. Hal ini penting terutama untuk mendukung kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan. Puncak kegiatan semakin semarak ketika animo masyarakat meningkat untuk menukar uang jelang Idul Fitri. Kali ini, BI memilih lokasi strategis di pusat perbelanjaan One Batam Mall agar masyarakat bisa menukar uang dengan nyaman, tidak lagi berdesakan di area parkir pelabuhan atau bandara seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, BI Kepri memberikan apresiasi kepada **Pejuang Rupiah**—yakni para petugas dan perbankan yang mendukung kelancaran layanan penukaran uang bersama. Acara ditutup dengan syukuran dan buka puasa bersama seluruh stakeholders, mempertegas semangat berbagi berkah di bulan Ramadhan.

Melalui SERAMBI 2025, BI tidak hanya memastikan ketersediaan uang layak edar, tetapi juga mengajak masyarakat Kepri untuk bijak mengelola Rupiah, mendukung UMKM lokal, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah di momen penuh berkah ini.



Gambar B2.1 Rangkaian Kegiatan Kick Off SERAMBI 2025 di KPw BI Provinsi Kepulauan Riau



Gambar B2.2 Kegiatan layanan penukaran uang bersama perbankan dan Edukasi CBP Rupiah di One Batam Mall 18 sd 19 Maret 2025

## BAB III

# Inflasi

### Provinsi Kepri (yoy)



Tw II  
2025

**1,32%**

Tw I  
2025

**2,01%**

### Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw II  
2025

**0,07%**

Tw I  
2025

**0,07%**

### Kota Batam (yoy)



Tw II  
2025

**1,68%**

Tw I  
2025

**2,53%**

### Kab. Karimun (yoy)



Tw II  
2025

**-0,15%**

Tw I  
2025

**0,15%**

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan II 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Pendidikan; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Dengan demikian, inflasi pada triwulan II 2025 berada di bawah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).



**Inflasi Provinsi Kepri triwulan II 2025 tercatat 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy).**

Inflasi Provinsi Kepri tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya disebabkan oleh penurunan harga yang terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil -0,14% (yoy); kelompok pendidikan yang memberikan andil -0,13% (yoy); dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa lainnya yang memberikan andil -0,01% (yoy). Secara spasial, 2 kota dan 1 kabupaten IHK di Kepri mengalami penurunan inflasi. Di Kota Batam inflasi tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya yakni dari 2,53% (yoy) menjadi 1,68% (yoy). Di Kota Tanjungpinang inflasi tercatat 0,07% (yoy) sama dengan triwulan sebelumnya. Sementara, IHK di Kabupaten Karimun mengalami penurunan tercatat deflasi 0,15% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,15% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional mengalami peningkatan dari 1,03% (yoy) menjadi sebesar 1,87% (yoy) pada triwulan II 2025.

Pada bulan Juni 2025, secara bulanan IHK Provinsi Kepri tercatat mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm), berbalik arah dibandingkan pada Maret 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm). Deflasi bulanan yang terjadi pada Juni 2025 utamanya disebabkan oleh deflasi yang terjadi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,55% (mtm) dengan andil sebesar -0,15% (mtm). Deflasi kelompok ini didorong oleh penurunan harga cabai merah, daging ayam ras, bayam, udang basah, dan kangkung yang didukung oleh pasokan yang terjaga. Penyebab deflasi juga berasal dari Kelompok Transportasi yang tercatat deflasi sebesar 0,25% (mtm) dengan andil sebesar -0,03% (mtm), sejalan dengan penurunan tarif angkutan laut yang memberikan andil sebesar -0,13% (mtm).

**Tabel 3.1** Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflasi Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87
Inflasi Kepri	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32
Inflasi Tanjungpinang	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07
Inflasi Batam	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68
Inflasi Karimun									2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15

Sumber: BPS(data diolah)

**Tabel 3.2** Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri Juni 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (%., mtm)
1	Angkutan Udara	Transportasi	0,11
2	Telur Ayam Ras	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,05
3	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,04
4	Ketimun	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,04
5	Kacang Panjang	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,02
6	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,02
7	Baju Anak Setelan	Pakaian dan Alas Kaki	0,01
8	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,01
9	Daun Seledri	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,01
10	Baju Muslim Wanita	Pakaian dan Alas Kaki	0,01

Sumber: BPS(data diolah)

**Tabel 3.3** Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri Juni 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%., mtm)
1	Cabai Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,14
2	Angkutan Laut	Transportasi	-0,13
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,08
4	Bayam	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,04
5	Udang Basah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,02
6	Kangkung	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,02
7	Bawang Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,02
8	Ikan Kembung	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01
9	Bensin	Transportasi	-0,01
10	Sotong (Segar)	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS(data diolah)

**Tabel 3.4** Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri Juni 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%., yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,62
2	Tarif Listrik	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,25
3	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16
4	Angkutan Udara	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,13
5	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,11
6	Minyak Goreng	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,11
7	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,10
8	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	0,07
9	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,06
10	Mobil	Transportasi	0,05

Sumber: BPS(data diolah)

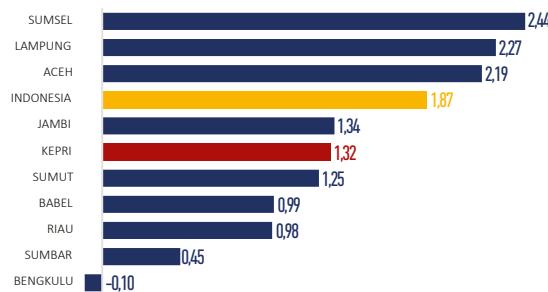
**Tabel 3.5** Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri Juni 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (%., mtm)
1	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,32
2	Sekolah Menengah Atas	Pendidikan	-0,23
3	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,14
4	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,10
5	Angkutan Laut	Transportasi	-0,09
6	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,08
7	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,06
8	Bensin	Transportasi	-0,04
9	Pakcoy	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,03
10	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,03

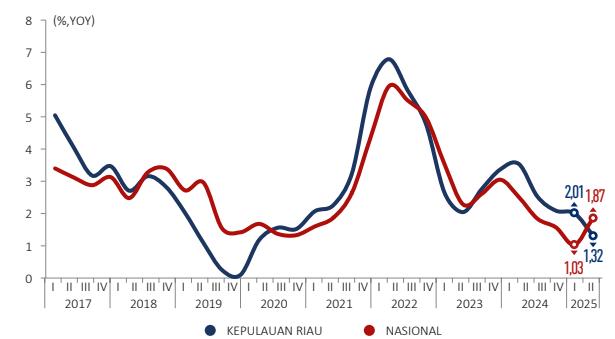
Sumber: BPS(data diolah)

### 3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

**Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tercatat 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,01% (yoy).** Inflasi Provinsi Kepri tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tetap terkendali dan berada di sekitar kisaran sasarannya inflasi tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar  $2,5 \pm 1\%$  (yoy).



Grafik 3.1 Inflasi Triwulan II 2025 Regional Sumatera (% yoy)



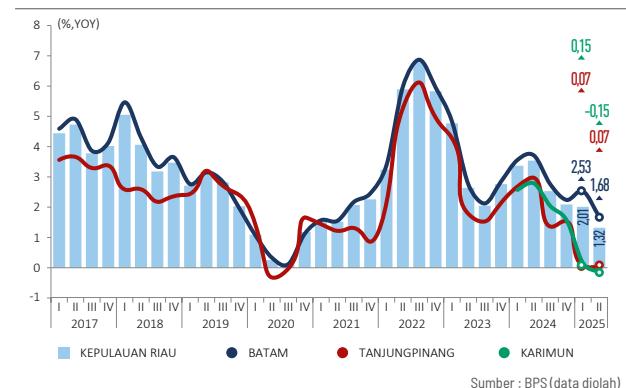
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan II 2025 (% yoy)

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 disebabkan oleh penurunan andil inflasi pada Kelompok Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil sebesar -0,14% (yoy) yang sebelumnya tercatat menyumbangkan andil sebesar 0,69% (yoy). Selanjutnya disusul Kelompok Pendidikan yang memberikan andil deflasi sama dengan triwulan I 2025, yaitu sebesar 0,13% (yoy).

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan minuman dan tembakau memberikan andil deflasi 0,14% (yoy) disebabkan oleh penurunan harga komoditas cabai merah sebesar -0,14%, (yoy), daging ayam ras -0,08% (yoy), bayam -0,04% (yoy), udang basah -0,02% (yoy) dan kangkung -0,02% (yoy) serta deflasi pada kelompok pendidikan yang sejalan dengan penetapan program beasiswa untuk menempuh pendidikan secara gratis bagi mahasiswa mulai jenjang D3 hingga S2.

### 3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/ KABUPATEN

**Secara spasial, dua Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam Kabupaten Karimun pada triwulan II 2025 tercatat dengan tren yang menurun, sedangkan Kota Tanjungpinang tercatat stabil.** Kota Batam mencatatkan penurunan pada angka inflasi dari yang sebelumnya 2,53% (yoy) menjadi 1,68% (yoy). Begitu pula di Kabupaten Karimun yang tercatat mengalami tren menurun dan berbalik arah dari inflasi 0,15% (yoy) menjadi deflasi 0,15% (yoy). Sementara itu, Inflasi Kota Tanjungpinang tercatat stabil sebesar 0,07% (yoy). Dengan demikian, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 2,01% (yoy).



Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

Tabel 3.6 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

No	Kelompok	2023								2024								2025							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		Andil	Inflasi																						
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12	1,61	5,40	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46	0,69	2,31	-0,14	-0,48	0,25	1,61	0,45	2,84
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92	0,20	3,87	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11	0,06	1,19	0,02	0,41	0,25	1,61	0,45	2,84
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08	0,25	1,50	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65	0,25	2,31	0,05	0,30	0,25	1,61	0,45	2,84
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77	0,03	0,69	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	0,25	1,61	0,45	2,84
5	Kesehatan	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45	0,01	0,35	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24	0,01	0,52	0,03	1,07	0,25	1,61	0,45	2,84
6	Transportasi	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18	0,12	0,87	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13	0,24	1,71	0,17	1,25	0,25	1,61	0,45	2,84
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22	0,02	0,27	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,01	-0,12	0,00	0,01	0,01	0,54
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75	0,01	0,73	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38	0,01	0,73	0,01	0,54	0,00	0,01	0,01	0,54
9	Pendidikan	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80	0,16	2,80	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84	-0,13	-1,87	-0,13	-1,84	0,00	0,01	0,01	0,54
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63	0,05	0,66	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42	0,29	3,07	0,23	2,45	0,00	0,01	0,01	0,54
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63	0,30	4,52	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53	0,61	10,03	0,69	11,06	0,00	0,01	0,01	1,32
Umum		4,77		2,64		2,05		2,76		3,37		3,54		2,53		2,09		2,01		1,32					

Sumber: BPS (data diolah)

### 3.2.1. Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan II 2025 mengalami inflasi sebesar 1,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,53% (yoy). Inflasi yang rendah secara tahunan ini sejalan dengan IHK kota Batam yang tercatat rendah secara bulanan dengan deflasi sebesar 0,06% (mtm). Inflasi di Kota Batam pada triwulan II 2025 yang lebih rendah ini disebabkan oleh andil inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat memiliki andil -0,04% (yoy) atau menurun dari 0,77% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Deflasi pada triwulan II 2025 didorong oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara bulanan.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini pada Juni 2025 tercatat mengalami deflasi 0,45% (mtm) dengan memberikan andil -0,13% (mtm). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga komoditas yang dominan antara lain cabai merah yang memberikan andil sebesar 0,13% (mtm); daging ayam ras sebesar 0,09% (mtm); bayam sebesar 0,04% (mtm); kangkung sebesar 0,02% (mtm); dan udang basah sebesar 0,02% (mtm). Selain itu, tekanan inflasi menurun pada Kelompok Transportasi tercatat deflasi 0,22% (mtm) dengan andil -0,03% (mtm). Sementara itu, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan harga pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang tercatat 0,77% (mtm) dengan andil 0,04% (mtm) seiring dengan peningkatan harga baju anak setelan yang tercatat andil inflasi 0,02% (mtm) dan peningkatan harga baju muslim wanita yang tercatat andil inflasi 0,01% (mtm). Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga tercatat inflasi sebesar 0,66% (mtm) dengan andil 0,04% (mtm) sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,04% (mtm) seiring peningkatan harga emas dunia di tengah dinamika ketidakpastian global.

### 3.2.2. Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan II 2025 mengalami inflasi sebesar 0,07% (yoy), sama dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi yang rendah disebabkan oleh penurunan andil inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami penurunan andil dari 0,47% (yoy) menjadi -0,33% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh

kembali stabilnya harga komoditas pokok seperti cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bayam, bawang merah, susu bubuk untuk balita, bawang putih, udang basah, sotong (segar), kangkung, dan jagung manis. Sementara itu, penurunan harga yang lebih dalam tertahan oleh inflasi angkutan laut, telur ayam ras, ketimun, emas perhiasan, dan kacang panjang.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga mengalami penurunan andil menjadi -0,49% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan harga pakaian dan alas kaki sejalan dengan normalisasi pembelian pasca HBKN Ramadhan dan persiapan Idulfitri yang berlangsung pada triwulan I 2025. Komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain sepatu wanita, sandal kulit wanita, sepatu anak, kemeja panjang katun pria, dan celana panjang jeans wanita. Lebih lanjut, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan juga mengalami penurunan andil menjadi sebesar -0,12% (yoy). Subkelompok yang mengalami deflasi antara lain subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,76% (yoy).

### 3.2.3. Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada triwulan II 2025 mengalami deflasi sebesar 0,15% (yoy), lebih rendah dan berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,15% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun tersebut disebabkan oleh penurunan andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami penurunan andil dari 0,31% (yoy) menjadi -0,53% (yoy) seiring dengan stabilitas harga komoditas pangan, seperti cabai merah, tomat, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah keriting, serta udang basah. Kelompok Pendidikan juga mengalami penurunan menjadi -0,34% (yoy) seiring dengan penurunan indeks harga subkelompok pendidikan menengah sejalan dengan pembebasan biaya pendidikan menengah untuk sekolah di Kabupaten Karimun yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Kepri. Selanjutnya, Kelompok Pendidikan Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar mengalami penurunan andil menjadi -0,73% (yoy) seiring dengan penurunan tarif listrik yang didorong oleh dampak lanjutan dari pemberlakuan diskon tarif listrik oleh pemerintah pada Januari–Februari 2025.

Tabel 3.7 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	II-2024			III-2024			IV-2024			I-2025			II-2025		
	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Kelompok Komoditas															
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,88	1,79	1,86	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09	0,77	0,47	0,31	-0,04	-0,33	-0,53
Pakaian dan Alas Kaki	0,20	-0,18	0,23	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10	0,12	-0,39	0,07	0,09	-0,49	0,07
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,18	-0,01	0,01	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12	0,55	-0,90	-0,73	0,56	0,09	-0,11
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,02	0,03	-0,04	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12	-0,01	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,08
Kesehatan	0,07	0,14	0,15	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05	0,01
Transportasi	0,65	0,36	0,01	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19	0,22	0,38	0,21	0,16	0,26	0,11
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01
Pendidikan	0,19	0,15	0,00	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	-0,11	-0,11	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,13	0,39	0,31	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42	0,31	0,12	0,33	0,24	0,04	0,42
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,43	0,31	0,25	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19	0,66	0,46	0,35	0,74	0,56	0,34
Umum	3,71	2,97	2,79	2,76	1,36	2,04	2,24	1,53	1,57	2,53	0,07	0,15	1,68	0,07	-0,15

Sumber: BPS (data diolah)

### 3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 diprakirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni  $2,5\pm1\%$ , mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada triwulan III 2025 diprakirakan tetap berada di titik tengah sasaran inflasi nasional seiring dengan normalisasi harga angkutan udara pasca tingginya pada HBKN Ramadhan, Idulfitri, Iduladha dan momen libur long weekend di triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi juga diprakirakan lebih tertahan akibat periode panen di sejumlah daerah sentra pemasok komoditas utama di Kepri sehingga pasokan bahan pangan strategis diperkirakan terjaga. Di sisi lain, perlu diwaspadai terdapat peningkatan tarif listrik di Kota Batam untuk penggunaan daya di atas 3.500 VA.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Juli 2025, Provinsi Kepri mengalami inflasi 0,19% (mtm), lebih tinggi dan berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm). Inflasi pada Juli 2025 terutama disebabkan oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,14% (mtm), sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas seperti harga bawang merah, daging sapi, ikan tongkol, cabai rawit, dan telur ayam ras. Selain itu, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga memberikan andil inflasi sebesar 0,01% (mtm) terutama akibat kenaikan harga seragam sekolah di tengah periode tahun ajaran baru. Lebih lanjut, inflasi juga didorong oleh Kelompok Transportasi yang memberikan andil inflasi sebesar 0,01% (mtm), terutama disumbang oleh komoditas bensin sejalan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2025 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Tensi perang dagang akibat tarif Trump; (ii) Transmisi harga impor ke harga jual domestik sejalan dengan nilai tukar yang terdepresiasi; dan (iii) Dampak lanjutan kenaikan tarif listrik di Kota Batam. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diprakirakan terkendali sejalan dengan harga tiket angkutan udara yang berada dalam batas normal seiring dengan normalisasi mobilitas; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

### 3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

**Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik.** Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk melalui strategi implementasi kerangka 4K

yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan II 2025 antara lain:

#### A. Keterjangkauan Harga

1. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebanyak 12 kali di Provinsi Kepri hingga Juni 2025.
2. Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebanyak 37 kali di berbagai wilayah Provinsi Kepri.
3. Sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
4. Pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Iduladha.
5. Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.

#### B. Ketersediaan Pasokan

1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi.
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* KAD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
3. Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
4. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah.

#### C. Kelancaran Distribusi

1. Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2. Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.

#### D. Komunikasi Efektif

1. *High Level Meeting* TPID Kota Tanjungpinang.
2. Rapat Koordinasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi Kabupaten Karimun.
3. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025.
4. *High Level Meeting* TPID dan TP2DD Se-Provinsi Kepri.
5. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025.
6. *Launching* Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun.



7. Capacity Building TPID Se-Provinsi Kepri.
8. Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.
9. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025 Kota Batam.
10. High Level Meeting TPID Kabupaten Karimun.
11. High Level Meeting TPID Kota Tanjungpinang.
12. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2025.
13. Koordinasi pelaksanaan Capacity Building TPID dan KAD dengan daerah penghasil.
14. Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
15. Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidentil. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, talkshow radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar murah, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi. Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

## BAB IV

# Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM



\* dari bank yang berlokasi di Kepri,

\*\* kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan II 2025 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit yang melemah disertai dengan risiko kredit mengalami peningkatan.



**Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan II 2025 mengalami perlambatan, tercemin dari pertumbuhan kredit yang melambat dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih tinggi.** Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 11,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang tumbuh sebesar 13,94% (yoy). Sementara jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 16,59% (yoy), mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,91% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 10,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Sementara, total Aset tercatat tumbuh sebesar 11,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,66% (yoy).

**Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga meskipun mengalami perlambatan.** Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Kepri tercatat sebesar 89,72%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 92,78%. Penyaluran kredit yang melemah turut didukung oleh kualitas kredit yang menurun dengan rasio *NPL gross* yang tercatat sebesar 2,90%, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,80%.

**Kinerja penyaluran kredit UMKM tumbuh positif dan mengalami akselerasi meski risiko kredit meningkat.** Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 17,23% (yoy), terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,20% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2025 didorong oleh tingginya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Pertambangan dan Penggalian, yang awalnya tumbuh negatif sebesar 20,70% (yoy), menjadi tumbuh 190,23% (yoy) pada triwulan II. Selain itu, peningkatan juga didorong oleh sektor konstruksi yang tercatat tumbuh sebesar 15,35% (yoy) pada triwulan II, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,05% (yoy).

## 4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

**Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 16,59% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 17,91% (yoy).** Penurunan ini terutama disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan, LU Listrik, Gas, dan Air, serta LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan laju penyaluran kredit disebabkan oleh termoderasinya kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 11,06% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,66% (yoy). Di samping itu, DPK tumbuh sebesar 10,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoy). Deselerasi tersebut terutama terjadi pada tabungan, sedangkan giro dan deposito tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih instrumen yang berjangka dan menawarkan imbal hasil lebih tinggi seperti giro dan deposito dibandingkan tabungan. Pada triwulan II 2025, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, yang tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*ratio NPL gross*) yang tercatat sebesar 2,90% pada triwulan II, sedikit mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80%, namun masih di bawah 5%.

### 4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

**Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 berjumlah Rp11,55 triliun atau tumbuh 11,06% (yoy), dan mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,66% (yoy).** Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Persero, BPD, dan Bank Swasta yang tumbuh masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 6,55% (yoy), dan 12,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,42% (yoy), 1,86% (yoy) dan 12,20% (yoy). Di sisi lain, aset dari kelompok Bank Asing dan Campuran mengalami kontraksi hingga 100% (yoy), seiring dengan tidak adanya lagi aset dari kelompok bank tersebut di Kepri sejak November 2024. Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan I 2025 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 47,66%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (46,53%), dan BPD (5,80%).

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)		Pertumbuhan (% YoY)	
	I	II	III	IV	I	II	Tw I 2025	Tw II 2025
Total Aset*	100,68	100,45	103,72	105,34	106,38	111,55	5,66%	11,06%
Total Dana*	82,20	86,84	89,14	91,07	91,15	95,75	10,89%	10,25%
Total Kredit*	48,61	51,19	51,96	53,11	55,38	57,30	13,94%	11,95%
Total Kredit**	71,72	73,69	74,34	79,32	84,56	85,91	17,91%	16,59%
NPL*	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	-	-
LDR*	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	-	-

Sumber: Bank Indonesia

\* dari bank yang berlokasi di Kepri,

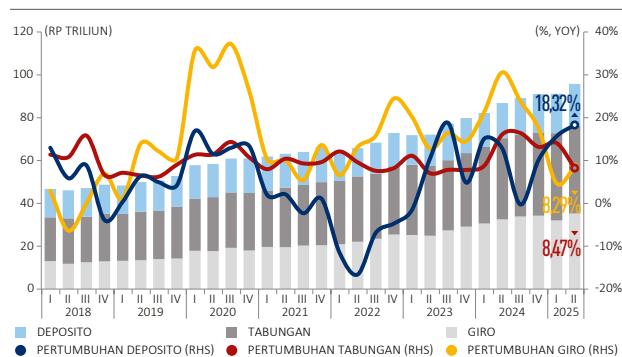
\*\*) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



---

#### Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan

Sumber : Bank Indonesia



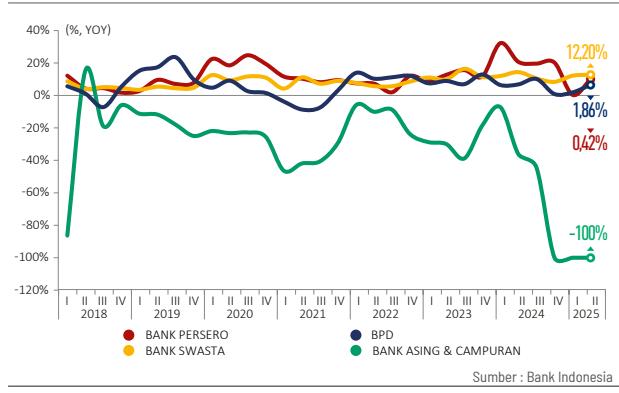
---

#### Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

#### **DAFTAR 4.1 BIRU TERBAIKAN BERDASARKAN SENSUS SMP/MTs**

#### **4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan**

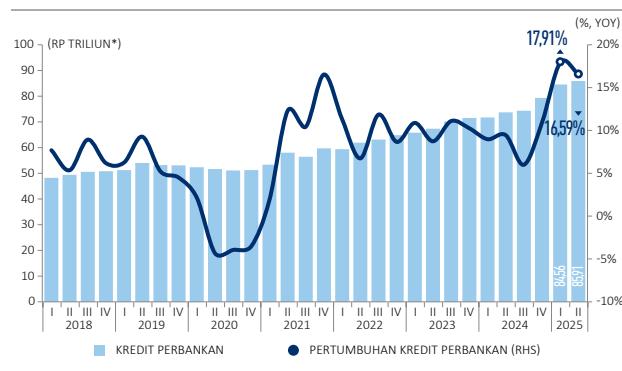
**Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 sebesar Rp85,91 triliun atau tumbuh 16,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 17,91% (yoy).** Penurunan terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,08% (yoy) pada triwulan II, lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,47% (yoy). Selanjutnya, kredit konsumsi juga mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh sebesar 12,98% (yoy) pada triwulan I, menjadi 11,72% (yoy) pada triwulan II. Di sisi lain, kredit investasi mengalami perbaikan dengan tumbuh sebesar 41,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 40,67% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan II 2025 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 41,10%, diikuti oleh kredit konsumsi 31,95% dan kredit modal kerja sebesar 26,96%.



#### Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

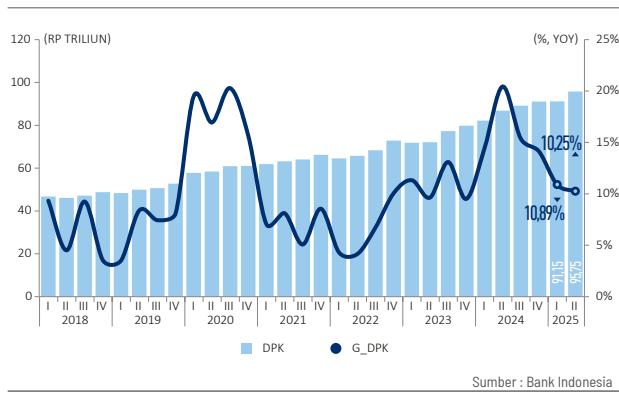
#### **4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan**

**Pada triwulan II 2025, total DPK di Kepri berjumlah Rp95,57 triliun atau tumbuh 10,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,89% (yoy).** Penurunan tersebut bersumber dari tabungan yang tumbuh termoderasi sebesar 8,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang tumbuh sebesar 14,09% (yoy). Sementara, giro dan deposito mengalami peningkatan menjadi masing-masing 8,47% (yoy) dan 18,32% (yoy), dari yang sebelumnya tumbuh 4,69% (yoy) dan 15,64% (yoy). Struktur DPK pada triwulan II 2025 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,84%, diikuti giro 36,85% dan deposito 20,31%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan besar dan jangka panjang (giro dan deposito) mengindikasikan mulai tingginya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.



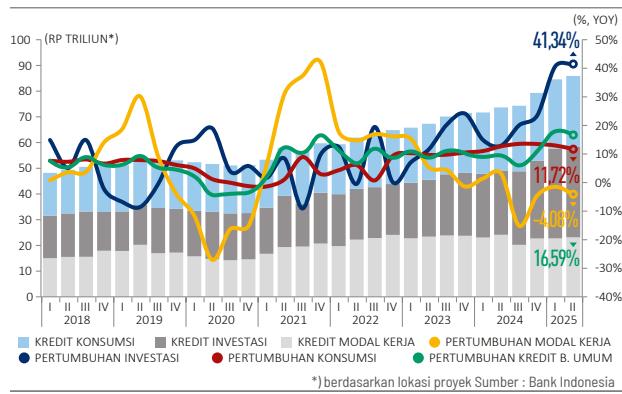
\* ) berdasarkan

#### Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan



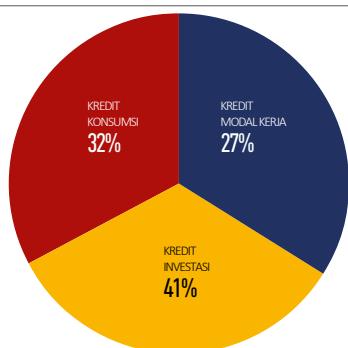
#### Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan

Sumber : Bank Indonesia

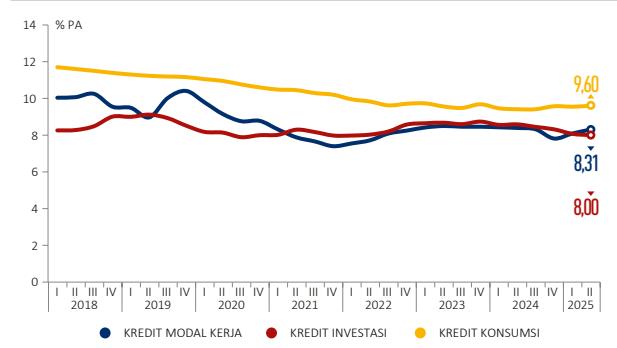


#### Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada triwulan II 2025, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,59%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,55%. Peningkatan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang tercatat masing-masing sebesar 8,31% dan 9,60%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,09% dan 9,55%. Di samping itu, perkembangan suku bunga simpanan (DPK) cenderung meningkat. Rata-rata suku bunga tabungan pada triwulan berjalan tercatat sebesar 0,65%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,61%. Suku bunga pada giro dan deposito juga mengalami peningkatan yang masing-masing tercatat sebesar 2,09% dan 4,66%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,08% dan 4,45%.



Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

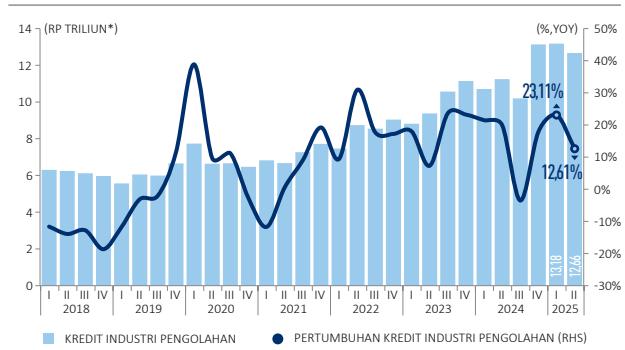


Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit

Secara sektoral, perlambatan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari kredit LU Industri Pengolahan yang tumbuh 12,61% (yoj), mengalami perlambatan dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,11% (yoj). LU Listrik, Gas, dan Air juga mengalami perlambatan dari yang sebelumnya tumbuh 73,79% (yoj) pada triwulan I menjadi 69,05% (yoj) di triwulan II. LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi juga termoderasi di triwulan II dengan tumbuh sebesar 21,69% (yoj), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang tumbuh 26,04% (yoj).

Perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Konstruksi yang tumbuh sebesar

19,95% (yoj), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,95% (yoj). Selain itu, LU Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 16,66% (yoj) pada triwulan II, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,38% (yoj). LU Pertambangan dan Penggalian juga meningkat dari yang sebelumnya terkontraksi 9,24% (yoj) di triwulan I, menjadi tumbuh sebesar 0,21% (yoj) di triwulan II 2025.



Grafik 4.9 Kredit Sektor Industri Pengolahan



Grafik 4.10 Kredit Konstruksi

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan II 2025 sebesar Rp65,29 triliun dengan pangsa 75,99% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,13% dari total kredit atau sebesar Rp7,84 triliun, diikuti Kabupaten Bintan dengan pangsa 5,42%

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan II 2025	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	65,29%	75,99%
Tanjungpinang	7,84%	9,13%
Karimun	4,49%	5,23%
Lingga	0,75%	0,87%
Natuna	2,57%	2,99%
Bintan	4,66%	5,42%
Kep. Anambas	0,33%	0,38%
<b>Kepulauan Riau</b>	<b>85,91%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bank Indonesia

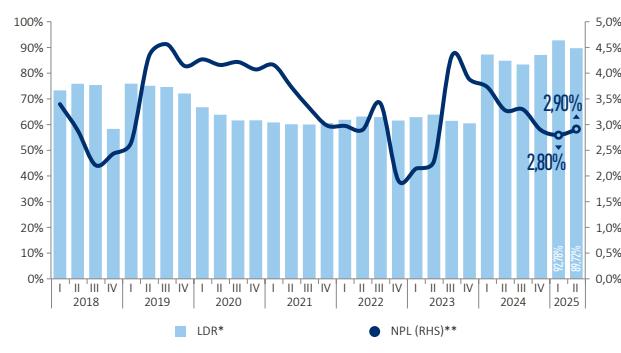
\*Berdasarkan lokasi proyek



dari total kredit atau sebesar Rp4,66 triliun dan Kabupaten Karimun dengan pangsa 5,23% dari total kredit atau sebesar Rp4,49 triliun.

#### 4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

**Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2025 mengalami penurunan menjadi 89,72%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 92,78%.** Penurunan pertumbuhan kredit turut didorong oleh kualitas kredit yang melemah sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat mengalami peningkatan dari 2,80% menjadi sebesar 2,90% di triwulan II 2025. Meskipun mengalami peningkatan, angka NPL ini masih mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah di Kepri masih dalam batasan risiko aman yaitu masih di bawah 5%.



\*berdasarkan lokasi \*\*berdasarkan lokasi bank proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

## 4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

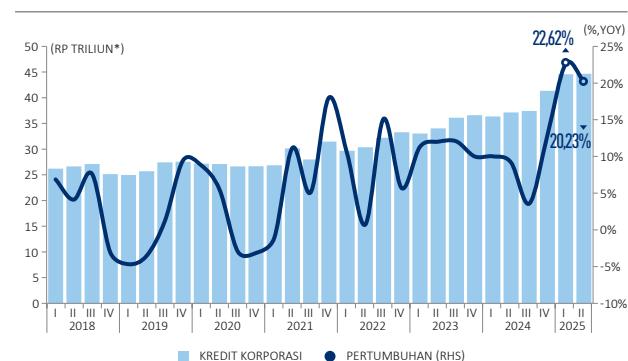
**Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan II 2025 terjadi deselerasi kinerja kredit sektor korporasi dan rumah tangga. Sementara itu, kredit sektor UMKM masih tumbuh positif dan sedikit terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya.

#### 4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

**Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami deselerasi pada triwulan II 2025.** Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp44,66 triliun atau tumbuh 20,23% (yoym), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,62% (yoym). Sejalan dengan pelemahan kredit, risiko kredit korporasi juga mengalami peningkatan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang meningkat menjadi 2,90%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,80%.

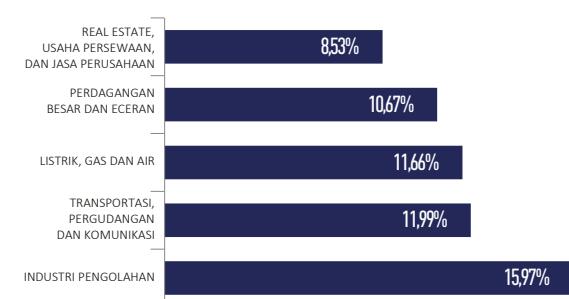
**Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 15,97% dari total kredit.**

Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (11,99%), LU Listrik, Gas, dan Air (11,66%)



\*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



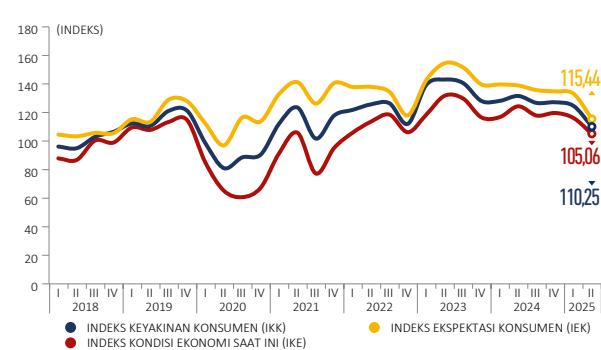
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

LU Perdagangan Besar dan Eceran (10,67%), serta LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (8,53%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan II 2025 masih < 6%.

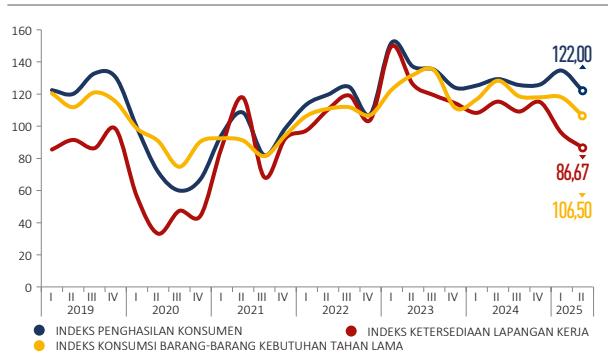
#### 4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

**Ketahanan sektor rumah tangga mengalami penurunan sejalan dengan termoderasinya penyaluran kredit rumah tangga dan tingkat konsumsi rumah tangga.** Hal ini sejalan dengan hasil survei konsumen yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan penurunan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 124,67; 116,17; dan 133,17 menjadi 110,25; 105,06; dan 115,44 pada triwulan II 2025.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.14 Survei Ekspektasi Konsumen

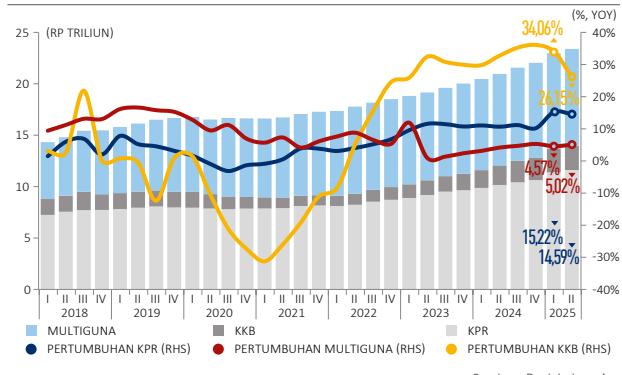


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.15 Survei Indeks Penghasilan Konsumen

Di sisi lain, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami penurunan pada triwulan II 2025 menjadi sebesar 122,00 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,67. Meskipun hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan tren yang menurun, namun tingkat keyakinan masih terjaga optimis (>100).

**Di tengah tingkat keyakinan konsumen yang termoderasi, penyaluran kredit rumah tangga juga mengalami penurunan.** Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 11,76% (yo), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,02% (yo). Penurunan didorong oleh KKB dan KPR triwulan II 2025 tumbuh masing-masing sebesar 26,15% (yo) dan 14,59% (yo), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 34,06% (yo) dan 15,22% (yo). Sementara itu, Kredit Multiguna mengalami akselerasi dari yang sebelumnya tumbuh 4,57% (yo) menjadi 5,02% (yo) pada triwulan II 2025.



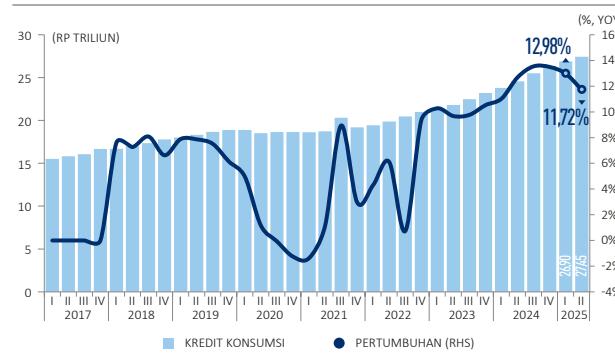
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%	1,84%	1,97%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%	2,38%	2,41%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%	0,90%	1,14%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%	2,20%	2,83%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%	1,46%	1,56%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%	1,20%	1,37%

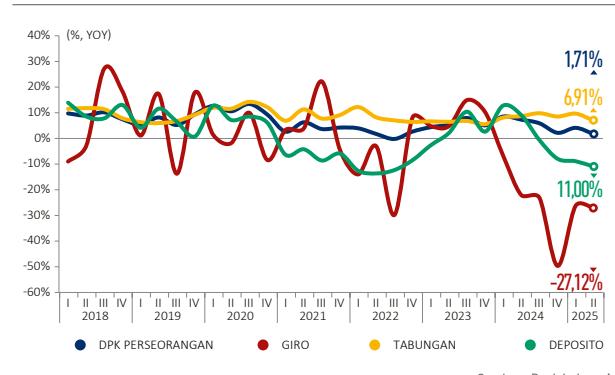
Sumber: Bank Indonesia  
\*) berdasarkan lokasi proyek



Sumber : Bank Indonesia

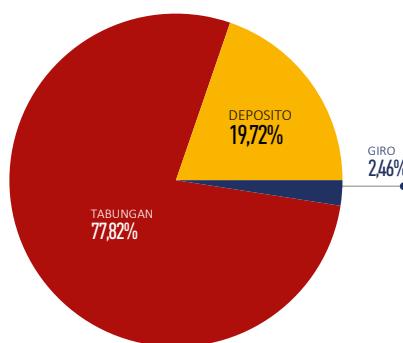
Grafik 4.17 Kredit Konsumsi

**Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 1,71% (yo), terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,14% (yo).** Deselerasi DPK perseorangan terjadi karena perlambatan yang terjadi di giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar -27,12% (yo), 6,91% (yo), dan -11,00% (yo) di triwulan II, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing masing -26,20% (yo), 9,66% (yo), dan -8,90% (yo). Pertumbuhan DPK yang secara umum melambat mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang meningkat pada triwulan II 2025 dibanding triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 77,82%, diikuti deposito 19,72% dan giro 2,46%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.



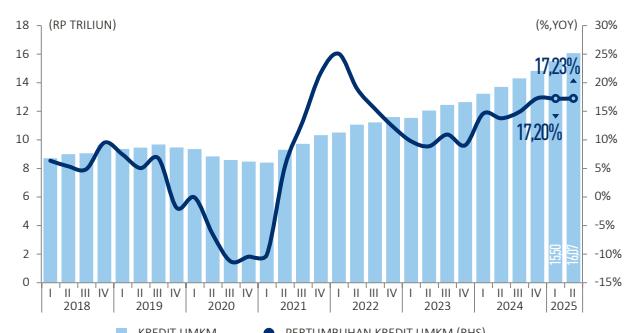
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan II 2025 tercatat meningkat namun masih berada dibawah threshold 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 1,97% dari sebelumnya sebesar 1,84% pada triwulan I 2025. Peningkatan NPL terjadi pada kategori KPR dari 2,38% menjadi 2,41%, KKB dari 0,90% menjadi 1,14%, Kredit Peralatan Rumah Tangga dari 2,20% menjadi 2,83%, Kredit Multiguna dari 1,46% menjadi 1,56%, serta Kredit Lainnya dari 1,20% menjadi 1,37%.

#### 4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan II 2025 tetap tumbuh positif dengan risiko kredit yang mengalami peningkatan. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 17,23% (yoj), sedikit mengalami akselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,20% (yoj). Di sisi lain, risiko kredit mengalami peningkatan, tercermin dari rasio NPL kredit UMKM yang semula tercatat sebesar 2,39% menjadi 3,27%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 18,71%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 18,33%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut dari waktu ke waktu semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Penyaluran kredit UMKM masih terkontraksi pada LU Industri Pengolahan yaitu terkontraksi sebesar 2,61% (yoj), LU Perikanan terkontraksi 1,74%, LU Perantara Keuangan terkontraksi 10,05%, dan LU Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang terkontraksi 20,29%.

Penyaluran kredit UMKM yang mengalami akselerasi didorong oleh peningkatan kredit pada LU Pertambangan dan Penggalian, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang masing masing tumbuh 190,23% (yoj), 15,35% (yoj), 6,43% (yoj), dan 13,63% (yoj), lebih tinggi

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh -20,70% (yoj), -5,05% (yoj), 4,88% (yoj), dan 9,11% (yoj).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Gambar B3.1 Pembukaan Gebyar Melayu Pesisir 2025

### BOKS 3

## Gebyar Melayu Pesisir 2025 : Sinergi Budaya, UMKM, dan Digitalisasi Menuju Ekonomi Mandiri

Gelaran Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025 di Batam pada 21-24 Agustus 2025 merupakan festival tahunan yang memadukan antara budaya, UMKM, dan digitalisasi. Acara ini lahir dari sinergi KPW Bank Indonesia Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri.

Tahun ini, GMP mengusung tema "Akselerasi Ekspor Menuju Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan". Tema tersebut menggambarkan urgensi bagi Kepri untuk mempercepat penetrasi pasar global, dengan posisi geografis yang strategis—berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia—Kepri memiliki keunggulan komparatif dalam akses ekspor. Kedekatan geografis ini menekan biaya logistik dan membuka peluang perdagangan yang lebih luas, sehingga akselerasi ekspor dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang mandiri sekaligus berkelanjutan.

Momentum penyelenggaraan GMP 2025 juga bertepatan dengan menyambut optimisme kinerja ekonomi Kepri. Pada triwulan II 2025, ekonomi tumbuh tinggi sebesar 7,14% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional. Secara kumulatif hingga semester I, ekonomi Kepri tumbuh 6,15% (ctc), menjadi yang tertinggi di Sumatera. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan. Inflasi turut terjaga di angka 1,97% (yoy) pada Juli

2025, berada dalam sasaran target  $2,5\pm1\%$ . Capaian ini tidak terlepas dari peran dan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah beserta mitra kerja melalui program GNPIP. Stabilitas sistem keuangan turut mendukung capaian pertumbuhan ekonomi Kepri, tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 16,59% (yoy), kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 17,23% (yoy) dan NPL yang tetap rendah. Artinya, UMKM tidak hanya hadir di panggung GMP, tetapi juga menjadi salah satu penggerak dalam perekonomian Kepri.

Rangkaian GMP 2025 semakin memperkuat peran UMKM dan digitalisasi. Sebanyak 81 produk UMKM unggulan dari seluruh kabupaten/kota di Kepri tampil melalui expo, fashion show. Dukungan terhadap UMKM juga turut disediakan melalui booth layanan terpadu yang menyediakan akses sertifikasi halal, legalitas usaha, hingga Hak Kekayaan Intelektual. Capaian transaksi penjualan GMP mencapai sebesar Rp12,85 miliar naik 4,38% dibandingkan tahun lalu, sementara business matching menghasilkan komitmen pembiayaan hingga Rp3,25 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kepri tidak berhenti pada promosi, melainkan diarahkan pada strategi naik kelas: korporatisasi, peningkatan kapasitas, hingga akses pembiayaan berkelanjutan.



Gambar B3.2 Laporan Pelaksanaan Gebyar Melayu Pesisir oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Rony Widijarto Purubaskoro



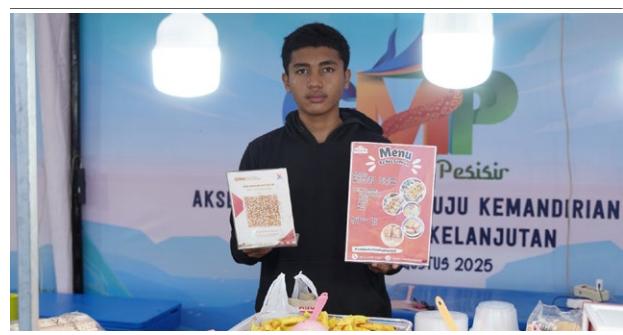
Gambar B3.3 Sambutan dari Asisten Gubernur Bank Indonesia Bapak Doddy Zulverdi



Gambar B3.4 Sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Drs. Adi Prihantara, MM.



Gambar B3.5 Seminar UMKM dengan topik "Wastra Reimagined: Menyatu dalam Fashion Modern"



Gambar B3.6 Stand Bazaar Makanan UMKM



Gambar B3.7 Produk UMKM Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau



Gambar B3.8 Fun Run

Di sisi lain, digitalisasi menjadi katalisator dalam percepatan perkembangan UMKM. Pada semester I 2025, nominal transaksi QRIS di Kepri mencapai Rp4,1 triliun, tumbuh 95,28% (yoY) dengan lebih dari 29 juta transaksi. Sepanjang GMP, tercatat 41.238 transaksi QRIS dilakukan masyarakat. Data ini menjadi bukti meningkatnya literasi keuangan digital. Bahkan, Kepri dengan posisi yang berbasiran langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Kepri berada di garis depan implementasi QRIS cross-border, yang tidak hanya melayani transaksi dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand tetapi juga diperluas ke Jepang dan uji coba dengan Tiongkok. Kehadiran QRIS lintas negara semakin menguatkan posisi Kepri sebagai hub perdagangan internasional sekaligus destinasi wisata regeneratif.

Rangkaian GMP 2025 juga dikemas inklusif melalui talkshow tematik, mulai dari Wastra Reimagined hingga Peluang Ekspor UMKM Perbatasan, yang relevan bagi pelaku usaha untuk memperluas wawasan. Ajang ini dilengkapi dengan perlombaan seni dan budaya, fun run 5K, hingga penampilan artis nasional. Dengan demikian, GMP

berhasil menjadi ruang belajar, promosi, sekaligus hiburan yang menyatukan masyarakat lintas usia dan latar belakang.

Namun, capaian ini juga membuka refleksi akan tantangan ke depan. Pertumbuhan ekonomi Kepri masih didominasi oleh Kota Batam, meninggalkan disparitas dengan wilayah lain. Ini menandakan perlunya strategi lebih inklusif dalam pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di sisi lain, peningkatan transaksi digital perlu diimbangi dengan pemerataan literasi di wilayah hinterland agar transformasi tidak hanya dirasakan sebagian kelompok masyarakat.

Gebyar Melayu Pesisir 2025 akhirnya menjadi bukti konkret bahwa budaya lokal dapat bersinergi dengan digitalisasi dan UMKM untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Dengan dukungan konsumen dalam membeli produk lokal dan adopsi transaksi digital, UMKM yang berdaya saing dan sistem pembayaran digital yang efisien akan terus menjaga keberlanjutan pertumbuhan, memperkuat fondasi kemandirian ekonomi Kepri, hingga dapat bersaing di panggung global.

## BAB V

# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan II 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan II 2025 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp714 miliar, tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp2,29 triliun. Lebih lanjut, pertumbuhan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi non-tunai semakin meningkat sejalan dengan kemudahan akses layanan pembayaran non-tunai. Hal ini mengindikasikan aktivitas perekonomian yang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan positif pada kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,14% (yoY) pada triwulan II 2025, terakselerasi dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,16% (yoY).

## 5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

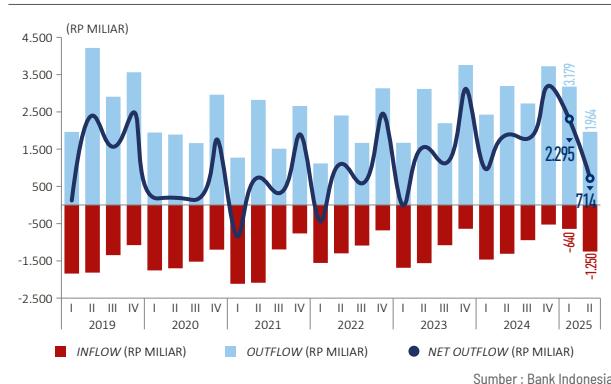
### 5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*/*Outflow*<sup>2</sup>)

Pada triwulan II 2025, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp714 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah uang yang beredar lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net outflow* sebesar Rp2,29 triliun. Meskipun pertumbuhan aliran uang tunai tersebut melandai dibandingkan periode sebelumnya, kinerja ekonomi Kepri tetap tumbuh positif mendukung pertumbuhan pada aktivitas perekonomian di Kepri.

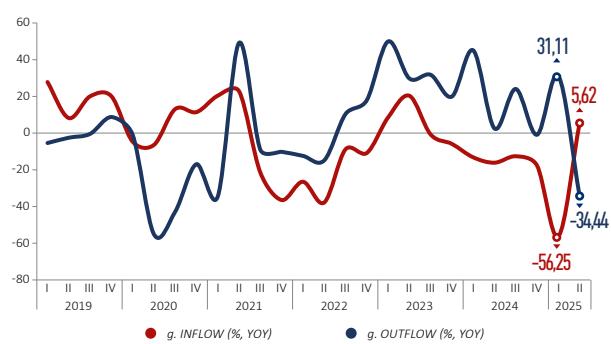
Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan II 2025 berjumlah Rp1,96 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 sebesar Rp3,18 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp1,25 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp640 miliar. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang masih kuat, meskipun masih tertahan oleh ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang yang masih berlanjut. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain aksekselerasi pada sektor Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Pertambangan, dan Konstruksi yang mengindikasikan aktivitas perekonomian yang mengalami peningkatan di triwulan II 2025. Peningkatan ini juga didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga pada sejumlah momen periode libur sekolah, *long weekend*, dan cuti bersama di triwulan II.

Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) untuk menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2025, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau terpencil, termasuk Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.

1) *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,  
2) *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank



Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

### 5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

**Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan.** Proses penyediaan uang kartal layak edar melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, kas keliling, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

**Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan II 2025 tercatat sebanyak Rp52 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp100 miliar.** Pemusnahan uang kartal yang sudah tidak layak edar mencakup uang yang rusak parah atau telah mencapai akhir masa edarnya. Penurunan pemusnahan uang kartal ini didorong oleh normalisasi pasca tingginya aktivitas penukaran yang terjadi di triwulan sebelumnya yang didorong oleh momen HBKN Ramadhan dan Idulfitri yang jatuh pada akhir triwulan I. Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.



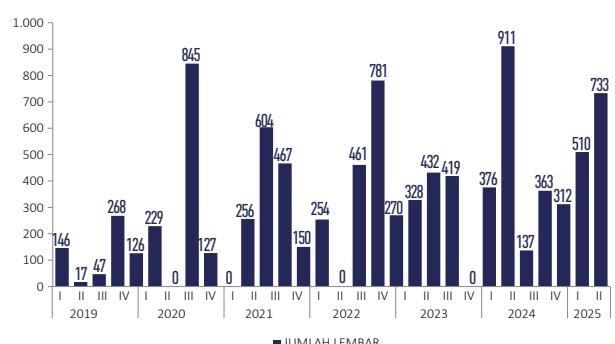
Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

Sumber : Bank Indonesia

### 5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, sejumlah kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan II 2025 terdapat 733 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 510 lembar uang palsu. Peningkatan temuan UPAL tersebut seiring dengan meningkatnya pelaporan temuan UPAL yang didorong oleh konsistensi BI dalam melaksanakan edukasi CBP Rupiah atau diseminasi terkait ancaman hukuman bagi pelaku. Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi langsung ke Bank Indonesia terdekat mengenai keaslian uang tersebut dan diimbau untuk melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang kepada bank, atau kepolisian. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Jika uang tersebut dinyatakan tidak asli oleh Bank Indonesia, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



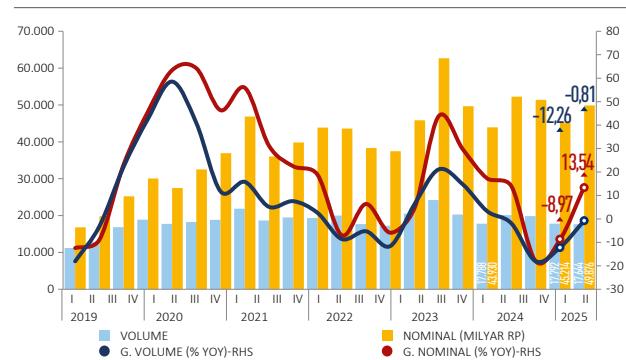
Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Sumber : Bank Indonesia

## 5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

### 5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

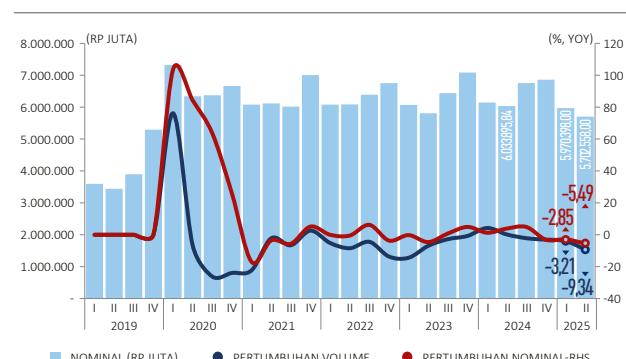
Nominal transaksi sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh positif pada triwulan II 2025. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tercatat mencapai Rp49,87 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp45,21 triliun. Nominal transaksi RTGS pada triwulan II tumbuh sebesar 13,54% (yo), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 8,97% (yo). Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan II 2025 terkontrak sebesar 0,81% (yo), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang terkontrak sebesar 12,26% (yo). Tren peningkatan transaksi RTGS mengindikasikan tingginya konsumsi masyarakat pada triwulan berjalan.



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

### 5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp5,70 triliun, mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp5,97 triliun. Lebih lanjut, pertumbuhan nominal transaksi kliring selama triwulan II 2025 terkontrak sebesar 5,49% (yo), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2025 yang terkontrak 2,85% (yo). Sementara, volume transaksi terkontrak 9,34% (yo) pada triwulan II 2025, lebih dalam dibandingkan triwulan



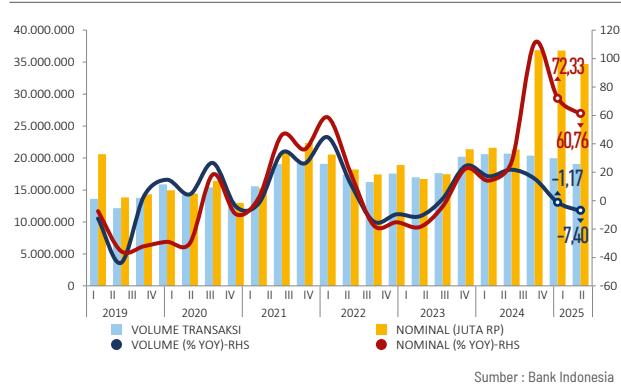
Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

I 2025 yang terkontraksi sebesar 3,21% (yoY). Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain melalui BI-RTGS dan SKNBI, telah tersedia pilihan transfer melalui BI-FAST dan QRIS yang menyediakan layanan 24/7 dengan lebih banyak kanal dan kemudahan akses untuk berbagai transaksi.

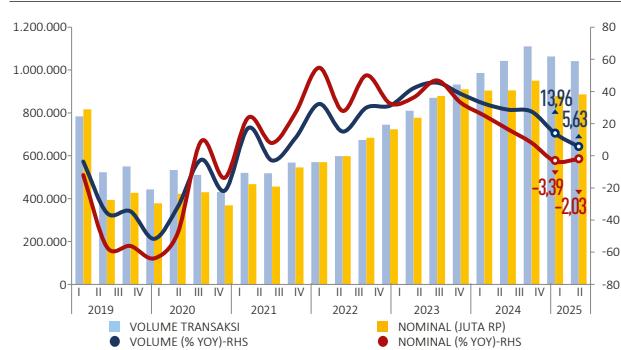
### 5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan II 2025 mengalami penurunan dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi. Nilai transaksi kartu debit terdeselerasi atau tumbuh sebesar 60,76% (yoY), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 72,33% (yoY). Sementara itu, volume transaksi juga mengalami kontraksi lebih dalam menjadi terkontraksi 7,40% (yoY), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,17% (yoY).

Di sisi lain, volume transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan II 2025 juga mengalami perlambatan. Volume transaksi tumbuh sebesar 5,63% (yoY), termoderasi dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh sebesar 13,96% (yoY). Meskipun demikian, nominal transaksi mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 3,39% (yoY) pada triwulan I, menjadi terkontraksi 2,03% (yoY) pada triwulan II. Meskipun dari sisi volume termoderasi, namun pertumbuhan nominal penggunaan kartu kredit masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

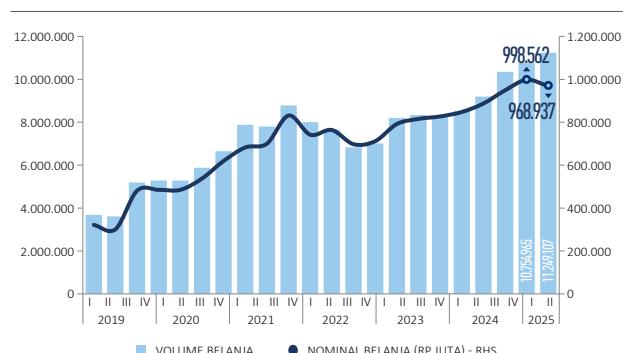


Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan II 2025 tercatat Rp968,93 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar Rp998,56 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 10,75 juta transaksi menjadi 11,24 juta transaksi pada triwulan II 2025. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

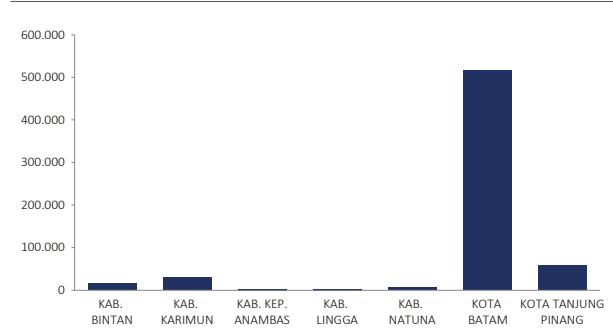


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

### 5.2.4 Perkembangan QRIS

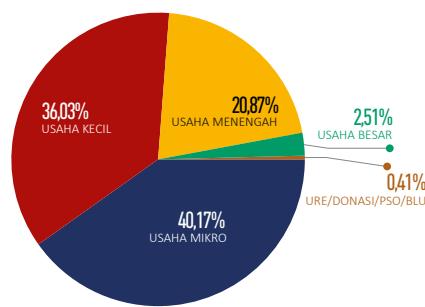
Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan II 2025 tercatat penambahan sebanyak 6.636 pengguna baru atau tumbuh sebesar 1,23% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tumbuh 1,43% (qtq), sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan II telah mencapai 544.542 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan II 2025 tercatat total transaksi sebanyak 16.279.841 transaksi, tumbuh sebesar 25,07% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,07% (qtq). Nominal total transaksi QRIS di Kepri hingga triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau tumbuh sebesar 13,82% (qtq).



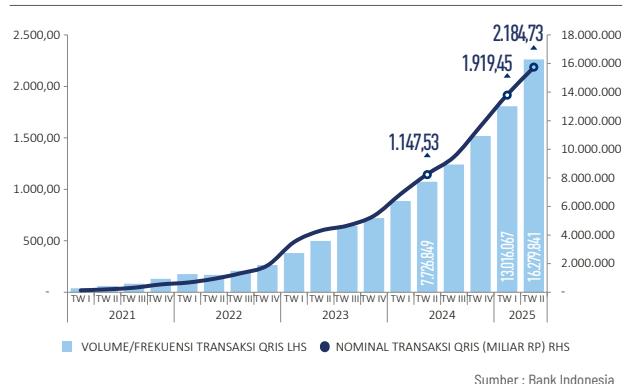
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri

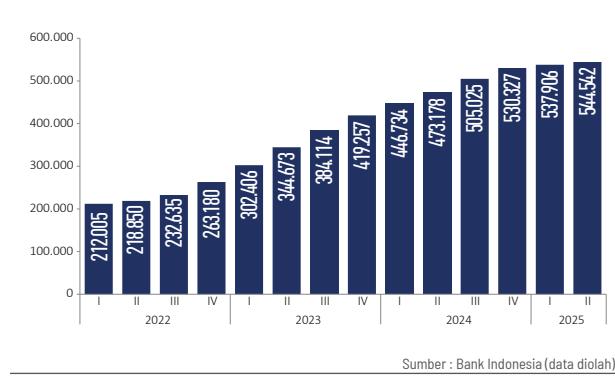
Hingga triwulan II 2025, jumlah merchant QRIS tercatat sebesar 630.958 merchant, atau tumbuh 17,78% (yoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,24% (yoY). Mayoritas merchant berlokasi di Kota Batam (81,82%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,13%) dan Kab. Karimun (4,70%). Merchant QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 40,17%, diikuti kategori Usaha Kecil (36,03%), dan Usaha Menengah (20,87%). Berdasarkan hal tersebut, terdapat 97,07% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.



Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha



Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

## 5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Berdasarkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, BI Kepri melakukan upaya strategi dalam peningkatan pengguna QRIS seperti sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, showcasing, dan onboarding QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan II 2025 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi QRIS Cross Border khususnya pada kawasan wisata.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. Reward bagi merchant dan user bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ onboarding/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
  - a. QRIS Goes to School/Campus;
  - b. Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
  - c. Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. On boarding pada sektor pariwisata seperti hotel, travel agent, dan objek wisata.
8. Showcase dan QRIS Experience dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

**Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS.** BI Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para stakeholders terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi QRIS khususnya QRIS Antarnegara kepada penggiat wisata melalui asosiasi diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), dan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI).

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS, khususnya QRIS Cross-Border mengingat letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Ke depannya Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan tempat keluar masuk turis mancanegara.

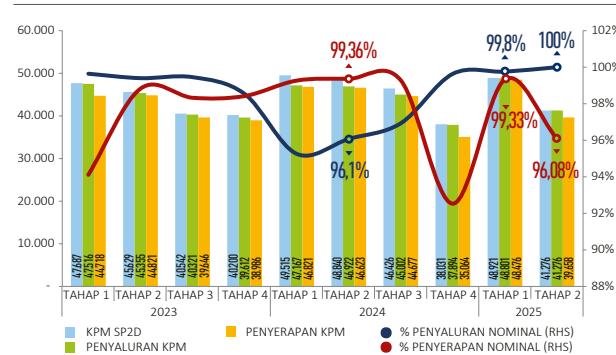
### 5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri memiliki beberapa strategi serta upaya untuk mendorong baik dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan Teller untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri hingga triwulan II 2025:

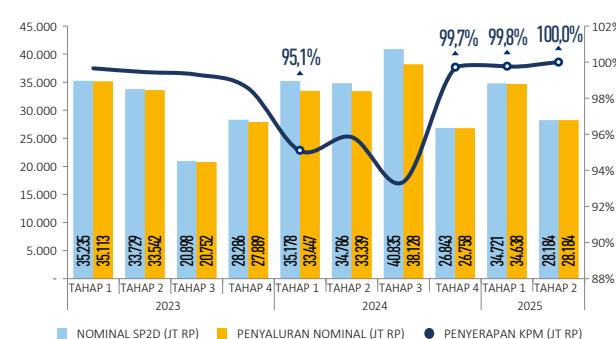
- Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk ekskalasi isu strategis & mendorong *political will* kepala daerah.
- Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

### 5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

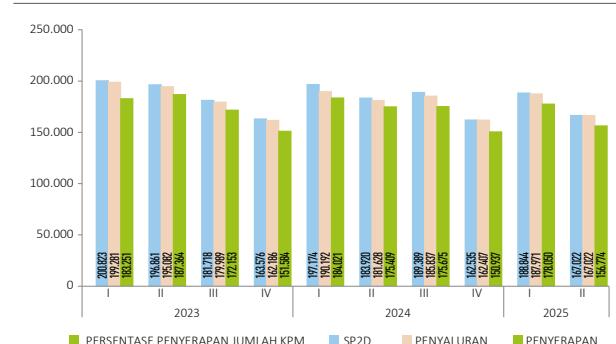
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program



Grafik 5.14 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 5.15 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber: Bank Indonesia, diolah (data per Agustus 2025)  
Grafik 5.16 Penyaluran Program Sembako Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri

Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 2 yang mencakup periode bulan April sampai dengan Juni 2025 atau sepanjang triwulan II 2025 secara nominal telah mencapai 100% sebesar Rp28,18 miliar untuk disalurkan kepada KPM sebanyak 41.276 KPM. Sementara itu, penyerapan bantuan PKH telah diserap oleh 39.658 KPM atau sebesar 96,08%. Penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan II 2025 adalah sebesar 167.022 penerima dengan persentase penyerapan terhadap penyaluran sebesar 93,86%.



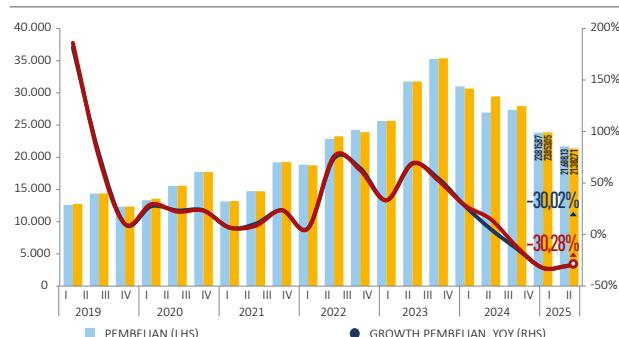
## 5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penyaluran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan monitoring perizinan dan pengawasan terhadap operasional 121 KUPVA BB dan 68 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan II 2025.

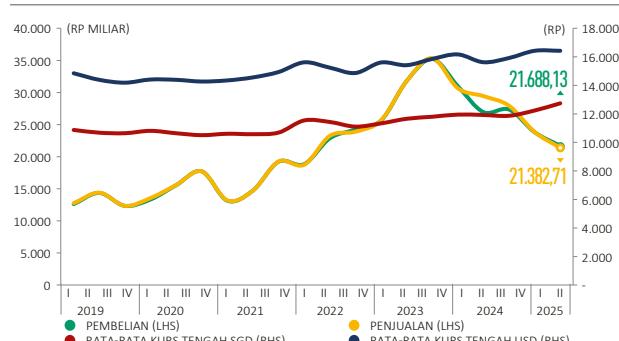
### 5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Kepri pada Triwulan II 2025 mengalami perubahan jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) jika dibandingkan dengan triwulan I 2025. Dimana jumlah Kantor Pusat (KP) yang awalnya 120 menjadi 121 kantor di triwulan II 2025. Sementara jumlah Kantor Cabang (KC) juga mengalami peningkatan dari yang awalnya berjumlah 69 kantor pada triwulan I menjadi 70 kantor pada triwulan II.

Pada triwulan II 2025, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 70,65% atau sejumlah Rp29,93 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 19,68% atau sejumlah Rp8,33 triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 5,15% atau sejumlah Rp2,18 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 2,69% atau sejumlah Rp1,13 triliun, dan mata uang lainnya sebesar 1,83% atau sejumlah Rp775,08 miliar. Secara umum, total transaksi UKA pada Triwulan II 2025 setara dengan Rp42,36 triliun, terkontraksi sebesar 8,04% (qtq) atau menurun setara dengan Rp3,70 triliun dibandingkan triwulan I 2025.



Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi KUPVA

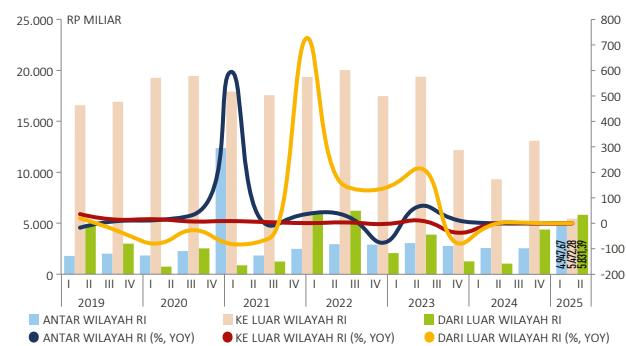


Grafik 5.18 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

### 5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi masuk ke dalam wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 35,88%, diikuti transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi *outgoing* dengan pangsa sebesar 33,67% dan transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik sebesar 30,44%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan II, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari luar negeri ke wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang ekspor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, telah diterbitkan 4 (empat) izin pembukaan kantor pusat KUPVA BB serta 4 (empat) izin pembukaan kantor pusat PJP Layanan Remitansi. Selain itu, masih terdapat 9 (sembilan) proses perizinan PJP Layanan Remitansi dan 4 (empat) proses KUPVA BB yang tengah berjalan. Kondisi ini mencerminkan bahwa industri KUPVA BB maupun PJP Layanan Remitansi masih menyimpan ruang pertumbuhan yang cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, dinamika pasar juga ditandai dengan adanya penutupan 3 (tiga) KUPVA BB dan 2 (dua) PJP Layanan Remitansi, yang menunjukkan bahwa meskipun peluang pertumbuhan terbuka, tantangan dan dinamika bisnis tetap perlu dikelola secara hati-hati agar keberlanjutan usaha dapat terjaga.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan, dari yang awalnya berjumlah 65 kantor menjadi 68 kantor. Dari frekuensi dan volume nominal transaksi, transaksi *outgoing* mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi *outgoing* terkontraksi 71,78% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 yang terkontraksi 25,03% (yoY). Transaksi *incoming* mengalami deselerasi pada triwulan II sebesar 49,88% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terakselerasi 111,89% (yoY). Transaksi domestik juga mengalami peningkatan, dimana pada triwulan II 2025 terjadi pertumbuhan sebesar 61,93% (yoY), lebih tinggi dari triwulan I 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 11,88% (yoY). Secara umum, pada triwulan II 2025 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri tercatat mengalami perlambatan, dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 10,68% (yoY) menjadi terkontraksi 38,29% (yoY) atau dari sebesar Rp20,05 triliun pada triwulan I 2025 menjadi sebesar Rp16,25 triliun.



Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi PJP LR

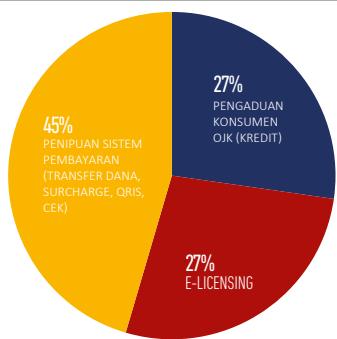


### 5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

KPwBI Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi Perlindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 KPwBI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan edukasi perlindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Tercatat 27 kali kegiatan edukasi telah berhasil dilaksanakan, melibatkan 3.764 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis yang terfokus pada edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen seperti perlindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, dan langkah-langkah untuk menghindari modus penipuan digital. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media sosial secara efektif untuk mensosialisasikan informasi penting terkait perlindungan konsumen.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti Pemerintah Daerah (Provinsi & Kota) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program edukasi. Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen – Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2023 Provinsi Kepulauan Riau sebesar 66,62% yang berada pada level kritis (60-80%). Hal ini menjelaskan bahwa konsumen telah mampu dan berani menyampaikan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebihan atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya.

Hingga triwulan II 2025, KPwBI Kepri telah menerima 11 (sebelas) pengaduan terkait berbagai isu konsumen, meliputi pengajuan maupun pembatalan izin serta permintaan penyesuaian sistem EASE, sengketa layanan perbankan, proses kredit, lelang, maupun transfer dana serta keamanan transaksi dan penipuan, mencakup kehilangan saldo, penipuan berbasis aplikasi, hingga aduan yang mencatut nama institusi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Jumlah Pengaduan Perlindungan Konsumen hingga Triwulan II 2025



Halaman ini sengaja dikosongkan

## BOKS 4

# Akselerasi Akseptasi Digital Masyarakat Melalui Cernival 2025

Dalam rangka perluasan akseptasi digital di wilayah Kepulauan Riau, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan *Creative and Innovative Riau Islands Carnival (CERNIVAL) 2025* yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Juli 2025 di Harbourbay Downtown Batam dengan tema "**Kepri Digital: Bergerak Bersama, Membangun Ekosistem Ekonomi Digital Terintegrasi**". Kegiatan ini menghadirkan rangkaian acara yang meliputi *Opening Ceremony*, Seminar Pelindungan Konsumen (*Coastal Era*), Pasar Malam Rakyat, *Night Run*, Ruang Edukasi, *Bazaar UMKM*, serta berbagai kompetisi kreatif. Pelaksanaan CERNIVAL 2025 didukung oleh kolaborasi berbagai pihak, termasuk perbankan, OJK, Bapenda, dan SAMSAT Keliling. Sinergi ini memperluas adopsi QRIS, memperkuat ekosistem keuangan digital, serta memberikan akses layanan keuangan langsung kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

CERNIVAL 2025 bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat pada inovasi digital dengan konsep menarik yakni "Pasar Malam Rakyat" melalui QRIS Rp1 sebagai wujud digitalisasi menyapa masyarakat dengan cara yang menyenangkan, sehingga pengunjung dapat belajar dan berinteraksi dengan teknologi pembayaran digital secara praktis. Kegiatan CERNIVAL 2025 secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, didampingi oleh perwakilan pemerintah daerah, perbankan, dan *stakeholder* terkait lainnya pada tanggal 25 Juli 2025 sebagai wujud sinergi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital Kepulauan Riau.



Gambar B4.1 Opening Ceremony CERNIVAL 2025

Sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, *bazaar UMKM* menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan CERNIVAL 2025. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat luas. Kegiatan ini juga mendorong pemanfaatan transaksi digital melalui QRIS, termasuk penerapan QRIS Cross Border, sehingga UMKM dapat menjangkau pelanggan tidak hanya secara lokal tetapi juga wisatawan mancanegara, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi digital, serta mendukung inklusi keuangan yang lebih luas. CERNIVAL 2025 juga menghadirkan ragam kompetisi melalui QRIS Experience Rp1 serta *fun night run* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan kreativitas dan literasi digital melalui aktivitas yang menarik dan interaktif.

Selama tiga hari pelaksanaan kegiatan, tercatat lebih dari 8.000 pengunjung hadir dan aktif berpartisipasi pada CERNIVAL 2025. Adapun transaksi digital yang tercatat menggunakan QRIS mencapai 140.026 transaksi, dengan nominal transaksi UMKM sebesar Rp253,6 juta. Hal ini menunjukkan akseptasi digital masyarakat yang signifikan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, UMKM, *stakeholder* lintas sektor, serta masyarakat umum mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing Kepulauan Riau di era ekonomi digital.



Gambar B4.2 Semarak CERNIVAL 2025



Halaman ini sengaja dikosongkan

## BAB VI

# Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

### Jumlah Angkatan Kerja



Februari 2025	<b>1.097.750</b>	Orang
Februari 2024	<b>1.078.170</b>	Orang

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



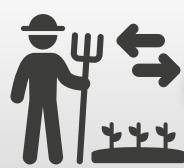
Februari 2025	<b>66,84%</b>
Februari 2024	<b>67,14%</b>

### Tingkat Pengangguran Terbuka



Februari 2025	<b>6,89%</b>
Februari 2024	<b>6,94%</b>

### Nilai Tukar Petani



Tw II 2025	<b>103,03</b>
Tw I 2025	<b>106,57</b>

### Tingkat Kemiskinan



Maret 2025	<b>4,44%</b>
Maret 2024	<b>5,37%</b>

### Indeks Pembangunan Manusia



Tahun 2024	<b>79,89</b>
Tahun 2023	<b>79,08</b>

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sejalan dengan tren akselerasi ekonomi yang terus berlanjut. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami penurunan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun pada hampir seluruh sub-sektor. Meskipun demikian, NTP masih terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara umum masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.



## 6.1 KETENAGAKERJAAN

### 6.1.1 Ketenagakerjaan

**Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)<sup>1</sup> yang menurun.** TPT pada Februari 2025 berada pada level 6,89%, menurun dibandingkan Februari 2024 yang tercatat 6,94%. Perbaikan kondisi tersebut utamanya terjadi di perkotaan yang mengalami penurunan TPT dari 7,06% pada Februari 2024 menjadi 6,99% pada Februari 2025. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan normalisasi aktivitas usaha

**Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan untuk seluruh level pendidikan mengalami penurunan, baik level pendidikan SMP ke bawah, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas).** TPT kelompok pendidikan SMP ke bawah, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi secara umum mengalami penurunan masing-masing dari rata-rata sebesar 7,22%, 8,16% dan 7,86% pada Februari

2024 menjadi 5,76%, 7,85% dan 6,33% pada Februari 2025. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berdasarkan level pendidikan mengalami perbaikan. Hal ini juga cerminan dari serapan tenaga kerja yang membaik di Kepri.

**Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 20,81% dari jumlah tenaga kerja pada Februari 2025, menurun dibandingkan Februari 2024 dengan pangsa 21,73%.** Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (17,17%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (14,96%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,58%), dan LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (8,77%).

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode										Perubahan 1 Tahun	
	Ags'17	Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Feb'24	Feb'25	Orang	% Perubahan	
Angkatan Kerja	1.065.553	1.039.132	1.129.501	1.153.878	1.057.918	1.107.353	1.078.170	1.097.750	19.580	1,82%		
Bekerja	996.994	972.575	1.062.004	1.037.133	973.125	1.023.125	1.003.390	1.016.540	13.150	1,31%		
Pengangguran	68.559	66.557	67.497	116.745	84.793	84.228	74.780	75.210	430	0,58%		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,41%	5,98%	10,12%	8,02%	7,61%	6,94%	6,89%		-0,72%		
- Perdesaan	6,32%	3,47%	2,33%	3,78%	5,69%	4,71%	5,73%	5,89%		2,79%		
- Perkotaan	6,45%	6,72%	6,30%	10,64%	8,25%	7,90%	7,06%	6,99%		-0,99%		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,85%	68,15%	67,23%	66,39%	66,48%	67,29%	67,14%	66,84%				

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Percentase Pengangguran							
		Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Feb'24	Feb'25**
1	≤SD	3,83%	6,06%	3,47%	5,37%	4,05%	4,78%	3,97%	5,76%
2	SMP	6,52%	3,30%	4,59%	8,61%	8,69%	6,45%	10,47%	
3	SMA	11,98%	6,87%	6,38%	11,18%	10,83%	10,33%	6,14%	7,85%
4	SMK	5,21%	11,20%	10,37%	13,39%	8,24%	9,41%	10,17%	
5	Diploma I/II/III	3,15%	4,30%	9,29%	15,23%	10,00%	8,16%	7,86%*	6,33%
6	Universitas	3,60%	4,37%	2,24%	9,59%	5,30%	5,12%		

Sumber: BPS (diolah)

\*Terdapat perubahan pola rilis di TPT Diploma dan Universitas. Rilis sebelumnya angkanya dipisah, namun per Feb 24 digabung

\*\*Terdapat perubahan pola rilis berdasarkan pendidikan yang dibagi pada 3 kategori saja yaitu SMP ke Bawah, SMA/SMK, Perguruan Tinggi

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Feb'24	Feb'25
1	Industri Pengolahan	15,33%	18,82%	17,18%	26,14%	24,54%	27,42%	21,73%	20,81%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	18,15%	17,64%	17,79%	20,16%	20,09%	17,24%	15,94%	14,96%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	14,36%	10,30%	19,91%	13,94%	12,95%	13,92%	17,78%	17,17%
4	Konstruksi	6,70%	7,79%	7,56%	8,49%	9,46%	8,02%	8,32%	6,85%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,37%	13,00%	12,13%	7,98%	7,17%	5,59%	7,77%	8,77%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27%	7,80%	6,38%	6,82%	6,16%	9,63%	11,16%	11,58%
7	Transportasi dan Pergudangan	5,85%	4,56%	5,14%	5,79%	6,15%	5,39%	5,98%	5,96%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	2,09%	1,73%	4,17%	4,78%	6,06%	5,87%	4,86%	6,19%
9	Jasa Lainnya	7,11%	5,89%	6,72%	4,63%	5,80%	5,62%	4,99%	5,58%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	1,19%	2,68%	3,01%	1,27%	1,62%	1,30%	1,46%	2,13%

Sumber: BPS (data diolah)

1 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja



**Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 63,94%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 16,82%.** Pangsa kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga/tak dibayar mengalami penurunan masing-masing 0,04 persen poin, 1,03 persen poin dan 0,32 persen poin pada bulan Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok buruh/karyawan, pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 0,56 persen poin, 0,65 persen poin, dan 0,18 persen poin pada bulan Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## 6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan II 2025 yang merupakan rata-rata bulan April-Juni 2025 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya (rata - rata bulan Januari-Maret 2025). Rata-rata NTP pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 103,03, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 106,57. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan menurunnya NTP pada sub-kelompok Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan.

**Tabel 6.4** Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

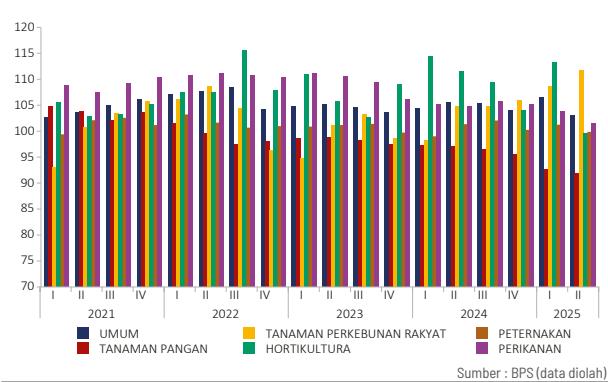
No	Status Pekerjaan Utama	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari									
1	Berusaha Sendiri	22,25	20,41	19,22	19,06	15,46	15,75	16,86	16,82								-0,04	
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	6,64	6,41	5,11	6,34	7,55	6,59	7,05	6,02								-1,03	
3	Berusaha dibantu buruh tetap	4,17	4,50	4,25	3,60	3,93	3,86	3,42	3,60								0,18	
4	Buruh/karyawan	58,64	59,49	63,48	61,04	62,57	67,78	63,38	63,94								0,56	
5	Pekerja Bebas	3,04	4,18	3,12	4,22	3,41	1,06	3,61	4,26								0,65	
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	5,27	5,00	4,82	5,74	7,08	4,96	5,68	5,36								-0,32	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>																

Sumber: BPS (diolah)

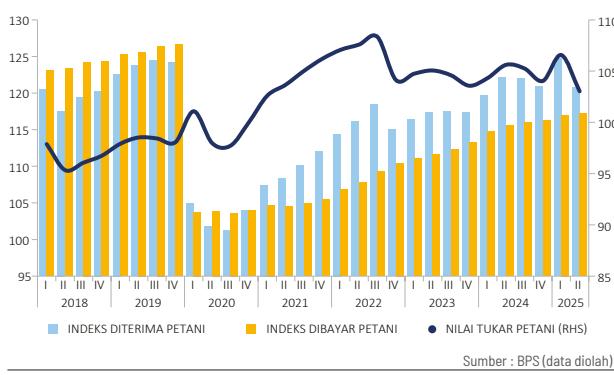
**Tabel 6.5** Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100																	
	2021				2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>1. Tanaman Pangan</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18	109,48	108,71
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46	118,21	118,35
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51	92,62	91,86
<b>2. Hortikultura</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16	132,47	116,58
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42	116,94	117,13
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07	113,29	99,53
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58	128,65	132,43
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53	118,39	118,57
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00	108,66	111,69
<b>4. Peternakan</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56	116,77	115,48
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27	115,34	115,63
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26	101,25	99,87
<b>5. Perikanan</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23	120,67	117,72
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39	116,17	116,46
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06	103,88	101,03
<b>Umum</b>																		
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94	124,69	120,79
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25	117,01	117,24
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04	106,57	103,03

Sumber: BPS (data diolah)



Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor



Grafik 6.1 Perkembangan NTP

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 111,69, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Tanaman Pangan sebesar 91,86. Sub kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat mencatatkan kenaikan dari 108,66 pada triwulan I 2025 menjadi 111,69 pada triwulan II 2025. Di sisi lain, terjadi penurunan pada sub-kelompok Tanaman Pangan yang tercatat 92,62 pada triwulan I 2025 menjadi 91,86 pada triwulan II 2025.

## 6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2025 tercatat sebanyak 117.280 orang, menurun dibandingkan periode September 2024 yang tercatat sebesar 124.960 orang. Pada periode Maret 2025, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp807.602/bulan/

kapita pada September 2024 menjadi Rp832.410/bulan/kapita pada Maret 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2025 tercatat sebesar 0,688%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebesar 0,635%. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2025 juga mengalami peningkatan dari 0,143% pada September 2024 menjadi sebesar 0,179% pada Maret 2025.

## 6.2.3 Gini Ratio (GR)

**Gini Ratio<sup>2</sup>** Provinsi Kepri pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,382, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,357. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode September 2024 – Maret 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,383, meningkat dari September 2024 tercatat sebesar 0,360. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,238, meningkat dari September 2024 yang tercatat sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri adalah yang tertinggi, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional (0,375).

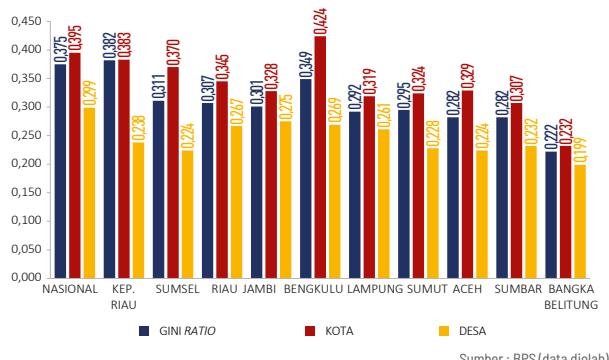


Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2021		2022		2023		2024		2025
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960	117.280	
Percentase Penduduk Miskin (%)	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78	4,44	
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602	832.410	
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1(%)	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635	0,688	
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2(%)	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143	0,179	
Pertumbuhan Penduduk Miskin (oy)	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%	-15,20%	
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (oy)	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%	5,74%	

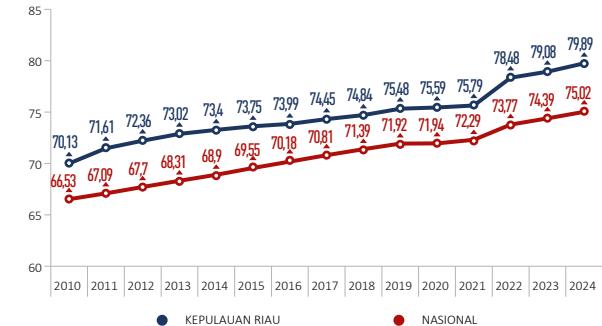
Sumber: BPS (data diolah)

<sup>2</sup> Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

Sumber : BPS (data diolah)



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Sumber : BPS (data diolah)

## 6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

**IPM Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat sebesar 79,89, meningkat 0,81 poin (1,01%) dibandingkan tahun sebelumnya 79,08.**

Peningkatan IPM Kepri 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023.

**Angka UHH penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat 75,12 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,90 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.** Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami

peningkatan menjadi 13,27 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,50 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.573.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.998.000,-.

**Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,32 dan 81,58.** Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

BAB VII

# Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diprakirakan tetap melambat meskipun tingkat pertumbuhannya cukup bervariasi antar negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Amerika Serikat diprakirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, penetapan tarif resiprokal yang jauh lebih rendah berdampak pada revisi atas perekonomian global dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sementara itu, perekonomian Indonesia juga diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan investasi. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi  $2,5\pm1\%$  (yoY). Beberapa faktor pendukung terjadinya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

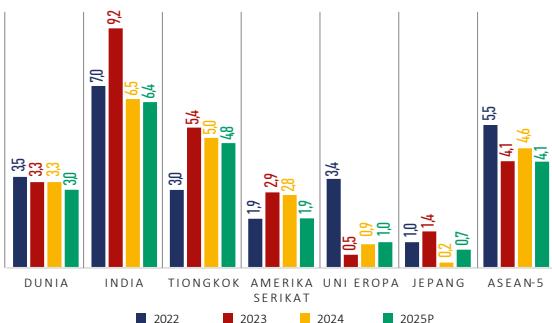


## 7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

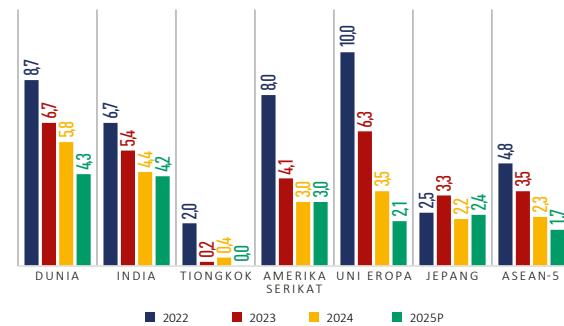
**Perekonomian global diprakirakan melambat dari tahun sebelumnya.** Berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) pada Juli 2025, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diprakirakan sebesar 3,0% (yo), atau meningkat 0,2% dibandingkan prakiraan pada bulan April 2025 atau melambat dari tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,3% (yo). Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (*advanced economies*) khususnya Eropa, serta revisi atas proyeksi untuk negara *emerging market and developing economies* khususnya diwilayah Asia. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi atas menjadi 1,9% (yo) seiring dengan penetapan tarif resiprokal yang lebih rendah dibandingkan April 2025. Hal ini turut berdampak pada perekonomian Tiongkok yang mengalami revisi atas menjadi 4,8% (yo) seiring dengan penetapan tarif resiprokal yang jauh lebih rendah dan aktivitas perekonomian yang tetap kuat pada semester pertama tahun 2025 namun melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok pada tahun 2024 secara berturut-turut sebesar 2,8% (yo) dan 5,0% (yo). Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara yang ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 sebesar 4,1% (yo), melambat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,6% (yo).

Tekanan inflasi global diprakirakan terus melanjutkan tren penurunan, dari 5,8% (yo) pada tahun 2024 menjadi 4,3% (yo) pada tahun 2025. Disinflasi global tersebut terutama didorong oleh penurunan harga komoditas inti serta ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diprakirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 cenderung stabil pada level 2,3% (yo) di tahun 2025, tidak berubah dari capaian pada tahun 2024.

**Econom Indonesia diprakirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,6% - 5,4% (yo).** Ke depan, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap baik ditopang oleh prakiraan peningkatan investasi, khususnya investasi non bangunan. Sementara itu, konsumsi rumah



Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% , yo)



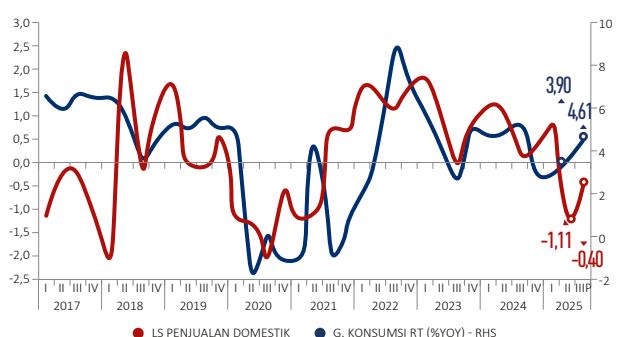
Sumber : IMF World Economic Outlook, April 2026

Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% , yo)

tangga perlu terus didorong sehingga dapat semakin menopang permintaan domestik. Adapun dari sisi eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama.

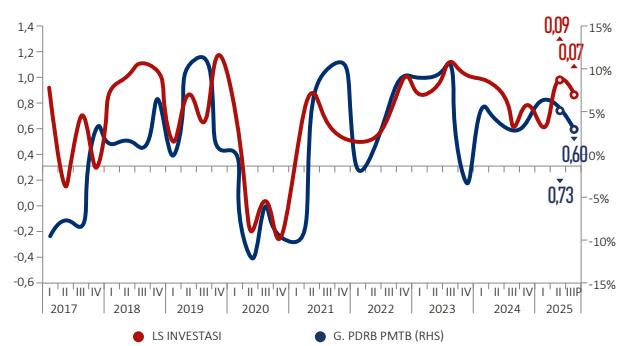
### Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha, Perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh kinerja domestik yang membaik, ditunjukkan oleh Likert Scale (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepri. Selain itu, investasi diprakirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri



\*) prakiraan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Penjualan Domestik



\*) prakiraan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi



**Tabel 7.1** Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman.	▲
Investasi	Berakhirnya tahun politik diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga tidak lagi bersikap <i>wait and see</i> .	▲
Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama Johor-Singapore <i>Special Economic Zone</i> (JS-SEZ) meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	▼
Transisi Pemerintahan AS	Transisi pemerintahan AS sebagai mitra dagang utama perlu dicermati, khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupti terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼

Pengolahan, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertambangan. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0% - 6,8% (yoy).**

**Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.** Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang oleh net ekspor dan PMTB seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan pada sisi industri pengolahan dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diprakirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diprakirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik.

## 7.2. PROSPEK INFLASI

**Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).** Inflasi pada tahun 2025 diprakirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diprakirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diprakirakan dapat meredam tekanan

inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjadinya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.
3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
4. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat.

## 7.3. REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

**Tabel 7.2** Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
Upside Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.</li> <li>• Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan.</li> <li>• Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.</li> <li>• Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.</li> <li>• Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat.</li> <li>• Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi.</li> </ul>
Downside Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diprakirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi.</li> <li>• Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan.</li> <li>• Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi.</li> <li>• Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.</li> </ul>

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
  - a. Pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
  - b. Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik.
  - c. Mendukung peningkatan *comparative advantage* daya saing investasi di Kepri di tengah semakin tingginya persaingan di kawasan (termasuk SJ SEZ) antara lain melalui penguatan insentif terhadap investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
  - a. Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihran sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan event, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*.
  - b. Mendukung implementasi kebijakan *short term visa* guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
  - c. Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
3. Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
4. Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
5. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi *merchant* dan *user QRIS* sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS cross border.
6. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar,

maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7(tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasi informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.



Halaman ini sengaja dikosongkan

# Lampiran

**Tabel 1** Ringkasan Eksekutif

## Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan

Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>MAKRO</b>														
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94	110,31	111,68	109,83
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23	106,32	106,59	106,59
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93	105,23	104,55	105,93
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79	101,60	101,85	101,76
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91	104,11	104,26	104,93
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86	112,86	112,69	112,95
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03	99,97	99,96	99,91
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45	102,08	101,99	101,83
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15	102,23	102,24	102,27
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87	103,02	104,80	105,22
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53	114,87	119,16	123,34
Pertumbuhan PDRB (yoy)**)	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02	5,14	5,16	7,14
Ekspor Non Migas(Juta USD**)	3,38	3,92	4,28	3,82	4,13	3,56	3,65	3,66	3,62	3,88	4,15	4,47	5,01	5,23
Impor Non Migas(Juta USD**)	3,23	3,25	3,75	3,55	3,95	3,71	3,66	3,20	3,20	3,00	3,78	4,03	4,38	5,31
<b>PERBANKAN</b>														
Giro (Rp miliar)	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876	34.257	32.041	35.284
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225	38.865	40.734	41.022
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040	17.950	18.373	19.443
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141	91.072	91.148	95.749
Total Asset (Rp miliar)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.479	105.336	106.380	111.55
Total Kredit (Rp miliar)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336	79.322	84.564	85.910
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%	8,59%	8,55%	8,59%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,30%	4,30%	4,24%	4,32%	4,48%	4,45%	4,66%
LDR (%) - Lokasi Proyek	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>														
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944	526	884	1.250
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726	3.725	3.179	1.964
Volume Kliring (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262	82.216	63.052	60.493
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866	4.167.192	3.366.996	3.374.095	3.731.188	3.987.954	3.240.296	3.095.976

Sumber: BPS dan BI

Ket: \*) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100

\*\*) Data Sangat Sementara

\*\*\*) data Perbankan dari Bank Umum

# Lampiran

**Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau**

Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Des 2023		Mar 2024		Jun 2024		Sep 2024		Des 2024		Mar 2025		Jun 2025	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm
UMUM		116,42	0,44	105,94	0,46	106,69	0,28	106,32	0,14	107,35	0,68	108,07	0,38	108,10	-0,12
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	107,66	0,82	109,16	0,32	110,36	0,56	107,94	0,10	110,31	2,05	111,68	-0,21	109,83	-0,55
a.	MAKANAN	106,69	0,97	108,32	0,31	109,50	0,54	106,33	(0,05)	108,85	2,40	110,29	-0,31	107,83	-0,69
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	106,26	0,05	106,73	0,00	107,58	0,49	108,11	0,75	109,27	0,28	110,06	0,18	110,48	0,00
c.	MINUMAN BERALKOHOL	102,71	0,91	101,81	0,00	102,32	0,00	103,06	0,02	103,06	0,00	103,69	0,00	104,14	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	117,91	0,46	119,00	0,01	120,64	0,68	122,93	0,86	124,90	0,57	126,07	0,31	128,17	0,27
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	104,12	0,32	105,34	0,05	106,15	(0,08)	106,23	0,00	106,32	-0,14	106,59	0,57	106,59	0,41
a.	PAKAIAN	104,36	0,21	104,57	0,01	106,01	0,04	106,07	0,01	106,15	-0,16	106,57	0,72	107,11	0,71
B.	ALAS KAKI	103,23	0,76	108,29	0,04	106,71	(0,54)	106,87	0,00	106,98	-0,07	106,69	0,00	104,61	-0,73
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	102,51	0,07	102,89	0,01	103,00	0,01	104,93	0,18	105,23	0,03	104,55	2,33	105,93	0,09
a.	SEWA RUMAH	105,14	0,00	105,26	0,00	105,51	0,00	106,28	0,36	106,56	0,00	107,66	0,00	108,23	0,21
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	101,40	0,01	102,13	0,01	102,30	0,12	102,57	0,03	103,43	0,02	103,45	0,00	103,54	0,04
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	100,96	0,21	101,57	-	101,57	0,00	105,55	0,09	105,78	0,08	103,05	6,11	105,91	0,00
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	101,82	0,05	102,11	(0,01)	101,79	0,00	101,79	0,08	101,80	-0,05	101,85	0,02	101,76	-0,12
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	101,92	0,00	102,01	0,00	102,10	0,00	102,16	0,05	102,25	0,09	102,62	0,00	102,62	0,00
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	103,17	0,51	103,17	0,00	103,17	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,01	102,92	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	100,57	0,44	100,69	0,00	100,88	0,56	101,03	0,01	101,16	0,02	101,26	0,01	101,20	0,01
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	98,72	0,00	99,25	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,64	0,15	100,64	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	102,23	0,00	103,10	0,00	103,04	(0,09)	104,25	0,14	104,27	0,02	104,63	0,29	104,72	-0,02
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	102,41	(0,09)	102,76	(0,01)	101,95	(0,18)	101,82	0,11	101,41	-0,12	101,71	-0,01	101,56	-0,22
V.	KESEHATAN	99,88	0,04	103,72	0,01	103,82	0,03	103,91	(0,01)	104,11	0,12	104,26	0,00	104,93	0,08
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	99,68	0,08	101,97	0,01	102,06	0,05	102,23	(0,02)	102,49	0,23	102,53	0,00	103,83	0,14
b.	JASA RAWAT JALAN	100,15	0,00	101,61	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00
VI.	TRANSPORTASI	110,51	0,87	110,79	0,02	111,56	0,71	111,86	0,11	112,86	0,53	112,69	-0,14	112,95	-0,25
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	101,95	0,00	102,75	0,01	102,94	0,14	104,60	0,02	104,81	0,05	105,39	0,00	105,88	0,00
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	110,95	(0,03)	113,65	0,01	113,71	0,01	113,73	(0,25)	113,33	0,04	113,68	-0,02	113,69	-0,11
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	117,25	3,45	111,25	(0,00)	114,25	2,94	113,55	0,61	118,19	1,68	116,07	-0,53	116,72	-0,80
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	106,50	0,00	107,43	0,00	107,43	0,00	116,04	8,01	122,90	6,44	123,79	0,00	123,79	0,00
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,07	0,06	100,06	(0,00)	100,03	0,00	100,03	0,00	99,97	0,00	99,96	-0,03	99,91	0,00
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,04	0,00	99,96	(0,00)	99,85	0,00	99,85	0,00	99,57	-0,02	99,55	-0,12	99,31	0,00
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,09	0,08	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VIII.	REKREASI, OLAHARGA, DAN BUDAYA	101,69	0,04	101,25	(0,01)	101,28	(0,01)	101,45	(0,06)	102,08	0,00	101,99	0,00	101,83	0,00
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHARGA	100,07	0,00	100,10	0,00	100,22	0,07	100,33	0,01	100,37	0,00	100,37	0,00	100,26	-0,11
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHARGA	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	109,62	0,00	109,62	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	103,07	0,07	101,96	(0,01)	101,75	(0,09)	102,07	(0,16)	103,60	-0,01	103,39	0,00	103,07	0,09
IX.	PENDIDIKAN	104,15	0,00	104,19	0,00	104,19	0,00	102,15	0,85	102,23	0,00	102,24	0,00	102,27	0,03
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	103,12	0,00	103,27	0,00	103,27	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	101,59	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	108,44	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	111,10	2,45	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	101,49	0,00	101,57	0,00	101,57	0,00	102,40	0,00	102,87	0,00	102,94	0,00	103,12	0,17
X.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01
XI.	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	106,83	0,64	108,30	0,06	111,06	0,13	112,53	0,07	114,87	0,11	119,16	1,16	123,34	0,51
a.	PERAWATAN PRIBADI	105,31	0,10	105,42	(0,00)	105,58	0,17	105,61	0,12	106,15	0,09	106,29	0,08	106,87	-0,07
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	110,89	1,60	115,53	0,06	124,65	0,06	129,45	(0,02)	135,60	-0,35	150,01	3,11	163,07	1,44
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	105,91	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00
d.	JASA LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	108,79	8,79	108,79	0,00	108,79	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

# Lampiran

**Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (%, mtm)**

KOTA	2022				2023				2024				2025	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%	0,68%	0,11%	-0,06%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%	0,70%	1,40%	-0,13%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%	0,64%	1,43%	-0,71%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%	0,68%	0,38%	-0,12%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%	0,44%	1,65%	0,19%

Sumber: BPS (data diolah)

**Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)**

Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2024												2025					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
<b>ASET</b>	92.330	94.529	100.684	97.499	97.690	100.447	101.001	101.656	103.479	105.054	105.646	105.336	106.916	109.630	106.380	108.171	107.696	111.552
<b>DANA PIHAK KETIGA</b>	79.946	81.684	82.197	82.197	84.010	83.798	86.701	87.575	89.141	90.745	90.467	91.072	93.135	94.947	91.148	92.681	92.165	95.749
a. Giro	28.958	30.767	30.605	30.605	31.543	30.484	32.555	32.770	33.876	34.262	34.009	34.257	35.969	36.836	32.041	33.574	33.064	35.284
b. Tabungan	35.173	34.984	35.705	35.705	36.399	36.858	37.951	37.773	38.225	38.805	38.930	38.865	39.451	40.133	40.734	40.540	39.493	41.022
c. Deposito	15.814	15.933	15.888	15.888	16.068	16.456	16.195	17.032	17.040	17.677	17.529	17.950	17.715	17.978	18.373	18.568	19.608	19.443
<b>KREDIT</b>																		
a. Jenis Penggunaan	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910
Modal Kerja	23.260	23.431	23.086	23.506	23.625	24.143	20.329	20.169	20.254	20.185	20.875	22.687	23.312	22.718	22.748	23.648	22.972	23.158
Investasi	24.562	24.510	24.826	25.083	25.198	24.980	28.566	28.198	28.563	30.148	29.929	30.300	30.900	31.457	34.922	34.506	34.802	35.306
Konsumsi	23.339	23.488	23.806	24.028	24.257	24.566	24.905	25.220	25.519	25.893	26.097	26.335	26.436	26.698	26.895	26.964	27.231	27.446
b. Jenis Kredit	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910
UMKM	12.588	12.778	13.224	13.070	13.387	13.711	13.848	13.902	14.302	14.504	14.447	14.832	14.727	14.978	15.499	15.757	15.783	16.074
Non UMKM	58.573	58.651	58.493	59.547	59.692	59.977	59.952	59.685	60.034	61.722	62.454	64.490	65.922	65.895	69.066	69.362	69.222	69.836
c. Kolektibilitas	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910
Lancar	62.018	62.281	63.049	63.791	64.453	65.380	65.624	66.169	67.510	69.439	70.179	73.015	73.977	74.065	78.073	78.469	78.454	79.499
D.P.Khusus	6.418	6.423	5.994	6.117	5.953	5.892	5.718	4.977	4.377	4.306	4.355	4.010	4.328	4.427	4.125	4.251	4.145	3.920
Kurang Lancar	398	353	160	153	142	118	163	217	201	161	155	107	154	134	132	165	182	210
Diragukan	197	261	450	125	160	194	150	144	216	256	207	139	134	198	199	176	508	526
Macet	2.130	2.111	2.065	2.432	2.372	2.104	2.144	2.079	2.033	2.065	2.004	2.051	2.056	2.049	2.035	2.057	1.716	1.755
<b>RATIO</b>																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	89,01%	87,45%	87,25%	88,35%	86,99%	87,94%	85,12%	84,03%	83,39%	84,00%	85,00%	87,10%	86,59%	85,18%	92,78%	91,84%	92,23%	89,72%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,83%	3,81%	3,73%	3,73%	3,66%	3,28%	3,33%	3,32%	3,29%	3,26%	3,08%	2,90%	2,91%	2,94%	2,80%	2,82%	2,83%	2,90%

Sumber: Bank Indonesia

# Lampiran

**Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)**  
Wilayah Kepulauan Riau \*\*)

KETERANGAN	2024												2025					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
ASET	19.676	21.195	21.316	22.069	20.758	21.516	21.799	21.535	22.594	24.080	23.989	24.362	24.507	25.787	22.135	22.408	21.071	22.473
DANA PIHAK KETIGA	19.842	20.781	20.859	21.564	20.541	21.398	22.114	22.112	23.210	23.715	23.297	23.554	24.402	25.189	21.528	21.669	20.348	21.731
a. Giro	6.701	8.024	7.885	8.502	7.202	7.932	8.696	8.472	9.513	9.931	9.447	9.738	10.506	11.313	7.230	7.912	5.989	7.013
b. Tabungan	10.300	9.713	9.899	9.975	10.287	10.379	10.378	10.292	10.355	10.429	10.542	10.638	10.624	10.584	10.892	10.810	10.722	11.109
c. Deposito	2.841	3.044	3.075	3.088	3.052	3.087	3.041	3.348	3.342	3.356	3.308	3.178	3.273	3.292	3.406	2.947	3.637	3.609
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624
Modal Kerja	3.757	3.789	3.823	3.805	3.787	3.764	3.793	3.864	3.922	4.115	4.806	4.810	4.837	4.181	4.467	4.571	4.521	4.391
Investasi	5.460	5.499	5.483	5.499	5.502	5.473	5.627	5.926	6.233	7.274	7.131	7.170	7.152	7.148	7.230	6.762	6.721	7.266
Konsumsi	8.036	8.093	8.179	8.206	8.266	8.348	8.445	8.487	8.576	8.658	8.707	8.760	8.777	8.837	8.872	8.877	8.916	8.968
b. Jenis Kredit	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624
UMKM	4.074	4.142	4.188	4.146	4.216	4.229	4.252	4.251	4.447	4.489	4.454	4.558	4.480	4.505	4.580	4.648	4.647	4.702
Non UMKM	13.179	13.239	13.297	13.365	13.340	13.355	13.614	14.026	14.284	15.557	16.191	16.182	16.286	15.661	15.989	15.561	15.511	15.923
c. Kolektibilitas	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624
Lancar	15.891	16.014	16.189	16.179	16.242	16.282	16.573	16.960	17.410	18.739	19.333	19.555	19.338	18.689	19.187	18.738	18.704	19.194
D.P.Khusus	718	716	612	655	645	615	604	586	600	591	602	494	720	762	671	711	689	667
Kurang Lancar	75	57	83	81	64	40	41	77	29	42	37	39	56	47	42	90	57	46
Diragukan	36	69	73	47	79	99	66	53	92	83	48	42	43	56	52	46	430	435
Macet	533	526	528	549	526	548	582	599	600	592	623	609	610	613	617	624	277	282
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,95%	83,64%	83,83%	81,20%	85,47%	82,17%	80,79%	82,66%	80,70%	84,53%	88,61%	88,05%	85,10%	80,06%	95,55%	93,26%	99,07%	94,91%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,73%	3,75%	3,91%	3,86%	3,81%	3,91%	3,86%	4,00%	3,85%	3,58%	3,43%	3,33%	3,41%	3,55%	3,46%	3,76%	3,79%	3,70%

Sumber: Bank Indonesia

\*\*) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

# Lampiran

**Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)**  
Kota Batam

KETERANGAN	2024												2025											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun						
ASET	72.655	73.334	79.369	75.430	76.932	78.931	78.540	79.201	80.121	80.885	81.857	80.974	82.409	83.843	84.245	85.763	86.825	89.079						
DANA PIHAK KETIGA	60.104	60.903	61.338	62.446	63.781	65.445	64.587	65.463	65.932	67.029	67.170	67.518	68.733	69.758	69.620	71.012	71.817	74.018						
a. Giro	22.257	22.743	22.720	23.041	23.479	24.598	23.859	24.298	24.364	24.332	24.562	24.519	25.463	25.523	24.811	25.662	27.075	28.271						
b. Tabungan	24.874	25.271	25.806	26.424	26.931	27.502	27.573	27.481	27.870	28.376	28.387	28.227	28.827	29.549	29.842	29.730	28.772	29.913						
c. Deposito	12.973	12.889	12.813	12.981	13.372	13.346	13.155	13.684	13.698	14.322	14.221	14.772	14.442	14.686	14.967	15.620	15.970	15.834						
KREDIT																								
a. Jenis Penggunaan	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286						
Modal Kerja	19.503	19.642	19.263	19.701	19.837	20.379	18.535	16.306	16.332	16.070	16.069	17.877	18.475	18.537	18.281	19.077	18.451	18.767						
Investasi	19.102	19.011	19.342	19.584	19.696	19.507	22.939	22.272	22.330	22.874	22.798	23.130	23.749	24.308	27.691	27.744	28.081	28.040						
Konsumsi	15.303	15.394	15.627	15.822	15.990	16.218	16.460	16.733	16.943	17.235	17.390	17.575	17.659	17.861	18.023	18.087	18.314	18.478						
b. Jenis Kredit	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286						
UMKM	8.515	8.635	9.036	8.925	9.171	9.482	9.596	9.651	9.856	10.014	9.993	10.274	10.247	10.473	10.918	11.108	11.136	11.372						
Non UMKM	45.393	45.412	45.196	46.182	46.352	46.622	46.338	45.659	45.749	46.165	46.263	48.308	49.636	50.234	53.077	53.801	53.711	53.914						
c. Kolektibilitas	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286						
Lancar	46.127	46.268	46.860	47.612	48.211	49.098	49.051	49.209	50.100	50.700	50.845	53.460	54.639	55.377	58.886	59.731	59.750	60.305						
D.P.Khusus	5.700	5.707	5.381	5.461	5.307	5.277	5.115	4.391	3.777	3.715	3.752	3.516	3.608	3.666	3.454	3.540	3.456	3.253						
Kurang Lancar	322	296	77	72	78	78	122	140	172	118	118	68	98	86	90	75	125	163						
Diragukan	161	192	377	78	81	94	85	91	124	173	159	97	91	142	147	130	78	91						
Macet	1.598	1.584	1.538	1.884	1.846	1.557	1.562	1.480	1.432	1.473	1.381	1.442	1.447	1.436	1.418	1.433	1.439	1.474						
RATIO																								
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	89,69%	88,74%	88,42%	88,25%	87,05%	85,73%	86,60%	84,49%	84,34%	83,81%	83,75%	86,77%	87,12%	87,02%	91,92%	91,41%	90,29%	88,20%						
b. Non Performing Loans (NPL)	3,86%	3,83%	3,67%	3,69%	3,61%	3,08%	3,16%	3,09%	3,11%	3,14%	2,95%	2,74%	2,73%	2,74%	2,59%	2,52%	2,53%	2,65%						

Sumber: Bank Indonesia  
Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

**Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun**

JENIS	2024								2025							
	I		II		III		IV		I		II		III		IV	
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari										
<b>A. WARKAT KLIRING</b>																
1.WARKAT(Lbr)	61.532	992	69.283	1.117	69.262	1.117	82.216	1.326	63.052	1.017	60.493	976				
2.NOMINAL(Jt.Rp)	3.366.996	54.306	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180	3.987.954	64.322	3.240.296	52.263	3.095.976	49.935				

Sumber: Bank Indonesia

# Lampiran

## Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertiimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan ( <i>volatile food</i> ), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah ( <i>administered prices</i> ).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus ( <i>persistent</i> ).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	<p>Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian</li> <li>2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.</li> </ol>
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika ( <i>real time</i> ) dengan mendebit maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertiimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPKN dan bank umum.
yo(y (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,  
Kota Batam, Kepulauan Riau

